

SKRIPSI

**EVALUASI EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DI KAB. LUWU**

**SAMSIAR
10573 04192 13**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2018**

SKRIPSI

**EVALUASI EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DI KAB. LUWU**

SAMSIAR

105730419213

*Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat Penelitian pada
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar*

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Evaluasi Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan

Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kab Luwu

Nama Mahasiswa : SAMSIAR

No. Stambuk/Nim : 10573 04192 13

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

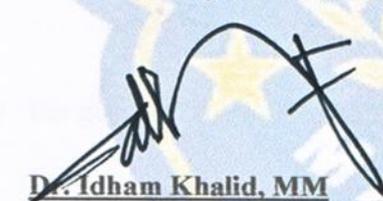
Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan diajukan didepan panitia penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada hari Senin, 12 Februari 2018 pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

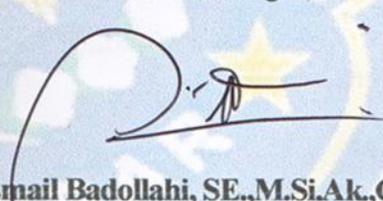
Makassar, 13 Februari 2018

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Idham Khalid, MM
NIDN. 0931126103


Ismail Badollahi, SE., M.Si.Ak., CA
NBM. 107 3428

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ketua Jurusan Akuntansi,


Ismail Rasnong, SE., MM
NBM. 003 078


Ismail Badollahi, SE., M.Si.Ak., CA
NBM. 107 3428

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Atas Nama Samsiar, Nim 10573 04192 13 Ini Telah Diperiksa dan Diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 125 Tahun 1439 H/2018 M dan telah dipertahankan di depan penguji pada Hari Senin, 12 Februari 2018 M. Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 26 Jumadil Awal 1439 H

13 Februari 2018 M

Panitia Ujian:

1. Pengawas Umum : Dr. H. Rahman Rahim SE., M.M

(Rektor Unismuh Makassar)

2. Ketua Umum : Ismail Rasulong, SE., MM

(Dekan Fakultas Ekonomi)

3. Sekretaris : Drs. H. Sultan Sarda, SE., M.Si

(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi)

4. Penguji: 1. Drs. Sultan Sarda, MM.

2. Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak.CA

3. Samsul Rizal, SE., MM.

4. Drs. Hamzah Limpo, M.Si.

ABSTRAK

SAMSIAR. “Evaluasi Efektivitas Dan Efisiensi Terhadap Tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD)”. Dibimbing oleh bapak Ismail Badollahi dan bapak Idham Khalid.

Efektivitas dan efisiensi terhadap tingkat pendapatan asli daerah sangat penting, karena untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil program kerja dengan target yang ditetapkan dan untuk mengukur perbandingan antara biaya dengan realisasi yang diperoleh. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana Tingkat pendapatan asli daerah apakah sudah efektif dan efisien, penelitian ini dilakukan di Dispenda Kab. Luwu. Metode analisa yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif, yaitu dengan menetapkan konsep perhitungan rasio keuangan dalam pengukuran kinerja keuangan, dengan menghitung rasio keuangan dari realisasi anggaran yang tertuang dalam APBD dan laporan Realisasi Anggaran. Teknik yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu berupa data laporan realisasi PAD anggaran untuk tahun 2014-2016 antara lain Rasio kemandirian keuangan daerah, Rasio efektivitas dan efisiensi PAD, Rasio Akrifitas, *DSCR*, dan Rasio Pertumbuhan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu dalam merealisasikan pendapatan asli daerahnya tergolong tidak efektif dan tergolong efisien, yakni pada tahun 2014 memiliki rasio efektifitas 62,19% dan rasio efisiensi 2,13% kemudian pada tahun 2015 memiliki rasio efektifitas sebesar 59,53% dan rasio efisien 2,71%, dan pada tahun 2016 memiliki rasio efektifitas 32,96% rasio efisien sebesar 2,16%.

Kata kunci: Efektivitas, Efisiensi, Tingkat PAD

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan ridho, rahmat, dan hidayahnya, tugas Proposal Penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Tidak lupa pula ucapan terima kasih untuk semua pihak yang telah banyak mendukung dalam segala hal mulai dari spirit, bimbingan, dan arahan.

Proposal penelitian ini merupakan salah satu kewajiban untuk memenuhi standar kelulusan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, maka penulis mengambil judul “Pendapatan Dan Belanja Daerah Di kab. Luwu.”.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu baik atas bimbingan, bantuan, semangat, dorongan, maupun doa dan kasih sayang yang sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini :

1. Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan pengarahan selama penulis menempuh proses pendidikan.
2. Bapak Ismail Badollahi.SE,M.Si.Ak,CA Ketua Program Studi/ Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar, yang dengan tulus memberikan nasehat, bimbingan, semangat serta petunjuk selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar ini sampai pada penyusunan dan penulisan skripsi ini.

3. Bapak Dr. Idham Khalid, MM selaku pembimbing I dan bapak Ismail Badollahi, SE,M.Si.,Ak.Ca selaku pembimbing II, yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk bagi penulis dalam rangka penulisan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi/Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammad yah Makassar yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis duduk di bangku kuliah.
5. Bapak Kepala Dispenda Luwu, serta segenap pegawai yang telah membantu penulis selama penelitian ini berlangsung.
6. Keluarga besarku tercinta yang selama ini memberikan dukungan moril dan materil, khususnya orang tuaku tercinta
7. Kepada Saudaraku, tersayang dan teman-teman angkatan 2013 yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu persatu. Semoga pertemanan ini akan tetap hadir dan melekat dalam hati kita masing-masing dan terima kasih atas semua bantuannya serta pengalaman berharga yang kalian berikan padaku selama ini.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis, karena keterbatasan tempat sehingga tidak dapat dituliskan namanya, namun tidak mengurangi rasa terima kasih penulis. Semoga segala bantuan yang diberikan walau sekecil apapun memperoleh ganjaran di sisi-Nya.

Dengan ini kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya,
kritik dan saran diharapkan dari para pembaca.

Makassar, Februari 2018

Penulis,

SAMSIAR

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Efektivitas dan Efisiensi	8
B. Pertumbuhan Ekonomi.....	9
C. Pendapatan Asli Daerah	19
D. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi PAD	26
E. Penelitian Terdahulu	29
F. Kerangka Pikir	50

G. Hipotesis	50
--------------------	----

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan waktu Penelitian	52
B. Metode Pengumpulan Data	52
C. Jenis dan Sumber Data	53
D. Metode Analisis	55

IV. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Bentuk Putusan dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan	59
B. Sejarah Dinas Pendapatan Daerah	61
C. Visi Misi.....	62
D. Struktur Organisasi	63
E. Tugas dan Tanggung jawab	64
F. Aktivitas Perusahaan.....	74

V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Anggaran Pemerintah	75
B. Anggaran dan Realisasi Anggaran Kab. Luwu	76
C. Perhitungan Rasio Keuangan Daerah Pada Kab. Luwu.....	77
D. Hasil Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Kab. Luwu.....	87

VI. PENUTUP

A. Simpulan	93
B. Saran	94

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Daftar Hasil Penelitian Terdahulu	40
Tabel 2: Anggaran dan Realisasi Anggaran Kab. Luwu	76
Tabel 3: Target dan Realisasi Tahun Penerimaan PAD	80
Tabel 4: Perhitungan Rasio Aktivitas Pemerintah Kabupaten Luwu	82
Tabel 5: Perhitungan <i>Debt Service Coverage Ratio</i> Kab. Luwu	83
Tabel 6: Perhitungan Rasio Pertumbuhan APBD Kab. Luwu.....	85
Tabel 7: Rasio Keuangan Daerah Kab. Luwu	87
Tabel 8: Rasio Efektivitas dan Efisiensi Kab. Luwu.....	88
Tabel 9: Rasio Aktivitas Kabupaten Luwu.....	90
Tabel 10: <i>Debt Service Coverage Ratio</i> Kab. Luwu	91
Tabel 11: Rasio Pertumbuhan Kabupaten Luwu	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Kerangka Pikir	50
Gambar 2 : Struktur Organisasi Intalasi	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Prof. Simon Kuznets (dalam Jhingan, 2000) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi itu adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, penyesuaian kelembagaan, dan ideologi yang diperlukannya. Pembangunan adalah usaha menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Maka, hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. yang berarti pembangunan harus dilaksanakan secara merata oleh segenap lapisan masyarakat baik dalam memikul beban pembangunan maupun dalam pertanggung jawaban atas pelaksanaan pembangunan daerah pada dasarnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang diarahkan untuk mengembangkan daerah dan mensesuaikan laju pertumbuhan antar daerah di Indonesia.

Menurut Sukirno (2013) pertumbuhan dan pembangunan ekonomi memiliki definisi yang berbeda, yaitu pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan. Sedangkan pembangunan ekonomi ialah usaha meningkatkan pendapatan perkapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi *rill* melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen. Ada empat faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa yaitu 1) Tanah dan kekayaan alam lainnya (SDA), 2) Barang-barang modal dan tingkat teknologi yang mencakup semua investasi baru dalam lahan, peralatan fisik dengan kemajuan teknologi, 3) Jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja melalui peningkatan kesehatan, pendidikan dan keterampilan kerja, pertumbuhan populasi yang akhirnya menyebabkan pertumbuhan angkatan kerja, 4) Sistem sosial dan masyarakat menentukan sampai dimana pertumbuhan ekonomi dapat dicapai, seperti sikap berhemat yang bertujuan untuk melakukan investasi, sikap bekerja keras dsb. Hal ini sejalan dengan teori ekonomi neo klasik yang menitikberatkan pada modal dan tenaga kerja serta perubahan teknologi sebagai unsur baru.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan untuk memberikan kesempatan dan ruang gerak bagi

upaya pengembangan demokratisasi dan kinerja pemda untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Kebijakan otonomi daerah memberi peluang bagi perubahan paradigma pembangunan yang semula lebih mengedepankan pencapaian pertumbuhan menjadi pemerataan dengan prinsip mengutamakan keadilan dan perimbangan. Daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawabnya untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat luas. Dengan semangat perubahan paradigma tersebut, Pemerintah daerah diharapkan mampu mengurus rumah tangganya sendiri. Kemandirian dalam mengelola kepentingan daerahnya sendiri telah menempatkan mereka dalam keadaan di mana mereka mampu bertindak lebih baik, maka itu harus disertai dengan kemampuan daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan tersebut baik dari segi finansial, sumber daya manusia (SDM), maupun kemampuan pengelolaan manajemen pemerintah daerah.

Sejak diberlakukannya UU No 22 tahun 2009 pasal 6 tentang pengawasan terhadap pelaksanaan norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2016 yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangantahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah harus mengelola keuangan daerah mereka sendiri.

Pengelolaan keuangan daerah yaitu berupa pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Menurut UU No.32 Tahun 2003 tentang pengertian APBD adalah sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dalam peraturan Daerah (Perda). Pengelolaan keuangan daerah dimulai dengan perencanaan/penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), yang kemudian disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD sebagaimana berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara APBD disusun dengan tujuan untuk dijadikan pedoman oleh pemerintah daerah dalam mengatur penerimaan dan belanja untuk pelaksanaan pembangunan daerah sehingga kesalahan, pemborosan dan penyelewengan yang merugikan dapat dihindari.

Untuk meningkatkan akuntabilitas dan keefluasaan dalam pembelanjaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal didalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu unsur APBD adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi kewenangan keuangan yang dimiliki daerah, maka semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur keuangan daerah, begitu pula sebaliknya Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2001:96).

Anggaran Daerah atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. APBD digunakan sebagai alat untuk menggambarkan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Dalam operasionalisasinya, kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari struktur APBD-nya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintahan dan program-program pembangunan. Namun, dalam implementasinya banyak daerah yang memiliki struktur kontribusi PAD relatif kecil terhadap total penerimaan daerah, sebaliknya sebagian penerimaan pendapatan terbesar justru berasal dari pendapatan pemerintah atau instansi lebih tinggi, hal ini menunjukkan ketergantungan yang sangat besar dari pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Dana untuk membiayai pembangunan daerah terutama digali dari sumber kemampuan keuangan sendiri dengan prinsip peningkatan kemandirian dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan kata lain, pemerintah daerah dipacu untuk meningkatkan kemampuan seoptimal mungkin dalam membelanjai urusan rumah tangganya sendiri, dengan cara menggali segala sumber dana yang potensial yang ada di daerah tersebut.

Demikian halnya dengan Kota Belopa yang merupakan ibu kota Kab. Luwu. Dalam rangka meningkatkan perekonomian otonomi daerah yang lebih

nyata, maka dari berbagai sumber/sektor dan sub sektor yang turut menunjang pendapatan daerah. Kesiapan Kota Belopa sendiri dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, identik dengan daerah kota lainnya dimana masih dipandang perlu mengoptimalkan sumber-sumber potensi daerahnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian di Kab. Luwu dengan mengambil judul “Evaluasi Efektivitas, Efisiensi dan Laju Pertumbuhan Atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kab. Luwu”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang menjadi masalah pokok dalam penulisan ini adalah: “Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kab. Luwu sudah Efektif, Efisien dan Bagaimana Laju Pertumbuhan di Desa Belopa, Kec. Belopa, Kab. Luwu?”.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu, untuk mengetahui Efektivitas, Efisiensi dan Laju Pertumbuhan di Desa Belopa, Kec. belopa, Kab. Luwu.

D. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan Pendapatan Asli Daerah di Kab. Luwu baik Efektivitas, Efisiensi maupun Laju Pertumbuhannya.

2. Manfaat Praktisi

1. Bagi instansi, sebagai informasi untuk mengetahui Efektivitas, Efisiensi dan Laju Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah.

2. Bagi penulis, sebagaibahanuntuk menambah wawasan mengenai Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini juga merupakan pengalaman berharga bagi penulis sekaligus sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Efektivitas dan Efisiensi

1. Efektivitas

Merupakan perbandingan antara realisasi suatu pendapatan dengan target yang ditetapkan. Efektivitas berarti tingkat pencapaian hasil program kerja dengan target yang ditetapkan, juga bisa dikatakan perbandingan antara outcome dengan output. Outcome adalah tujuan/target yang ditetapkan (Abdul Halim, 2007: 75). Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri N0. 690.900-327 Tahun 1994 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan, Standarisasi Tingkat Efektivitas ditetapkan sebagai berikut (Medi, 1996 dalam Lalu Karyawan, 2002:50) :

- a. Koefisien efektivitas bernilai diatas 100% berarti sangat efektif;
- b. Koefisien efektivitas bernilai antar 90%- 100 % berarti efektif
- c. Koefisien efektivitas bernilai antar 80%- 90 % berarti cukup efektif
- d. Koefisien efektivitas bernilai antar 60%- 80 % berarti kurang efektif
- e. Koefisien efektivitas bernilai dibawah 60% berarti tidak efektif

2. Efisiensi

Merupakan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh suatu jenis pendapatan dengan realisasi penerimaannya. Efisiensi merupakan perbandingan output dengan input yang dikaitkan dengan standar kinerja/target yang ditetapkan, jadi efisiensi merupakan

rasio terbaik antara output dengan biaya (*input*). Penghitungan efisiensi dimaksudkan untuk mengukur perbandingan antara biaya dengan realisasi yang diperoleh. Efisiensi dikatakan lebih baik apabila perbandingan biaya dengan realisasi yang telah dicapai nilainya semakin kecil (Abdul Halim, 2007: 74).

B. Pertumbuhan Ekonomi

1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat (Putra, 2009). Sedangkan Kuznet (dalam Jhingan, 2000:57) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi suatu negara sebagai kemampuan negara itu untuk menyediakan barang-barang ekonomi yang terus meningkat bagi penduduknya, pertumbuhan kemampuan ini berdasarkan pada kemajuan teknologi dan kelembagaan serta penyesuaian ideologi yang dibutuhkannya.

Pengertian yang lain dari pertumbuhan ekonomi dikemukakan Sukirno (2004:435) ialah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan.

Berdasarkan dari beberapa definisi di atas bahwa pertumbuhan ekonomi merujuk pada suatu proses untuk memperoleh output, dimana ukuran pencapaian memerlukan jangka panjang.

2. Teori Pertumbuhan Ricardo

Ricardo terkenal dengan teori *the law of diminishing returns*. Dengan terbatasnya luas tanah, maka pertumbuhan penduduk (tenaga kerja) akan menurunkan produk marginal. Selama buruh yang dipekerjakan pada tanah tersebut bisa menerima tingkat upah di atas tingkat upah alamiah, maka tenaga kerja akan terus bertambah, hal ini akan menurunkan lagi produk marginal tenaga kerja dan pada akhirnya akan menekankan tingkat upah ke bawah.

Menurut Ricardo, peranan akumulasi modal dan kemajuan teknologi adalah cenderung meningkatkan produktivitas tenaga kerja, artinya bisa memperlambat bekerjanya *the law of diminishing returns* yang pada gilirannya akan memperlambat pula penurunan tingkat hidup ke arah tingkat hidup minimal. Proses ini adalah proses tarik menarik antara kekuatan dinamis yaitu *the law of diminishing returns* dan kemajuan teknologi. Ricardo memberi penegasan bahwa suatu negara hanya bisa tumbuh sampai batas yang dimungkinkan oleh sumber daya alamnya.

3. Teori Pertumbuhan (Solow-Swan)

Teori ini memandang bahwa perekonomian akan tetap mengalami tingkat pengerjaan penuh (*full employment*) dan kapasitas peralatan modal

akan tetap sepenuhnya digunakan sepanjang waktu. Sumber pertumbuhan dapat dibedakan menjadi pertumbuhan yang disebabkan oleh modal, tenaga kerja dan perubahan dalam produktivitas. Perbedaan dalam produktivitas ini menjelaskan adanya perbedaan pertumbuhan antar negara, sedangkan yang mempengaruhi produktivitas adalah kemajuan teknologi dengan mengasumsikan suatu tingkat tabungan dan tingkat pertumbuhan penduduk tertentu, model pertumbuhan Solow-Swan dapat menghasilkan berapa tingkat pendapatan perkapita suatu negara. Bentuk fungsi produksi dalam model pertumbuhan Solow adalah:

$$Q = f(K, L); K, L > 0$$

Pada persamaan di atas Q adalah output bersih sesudah depresiasi, K adalah modal, dan L adalah tenaga kerja. Menurut Romer dan Well (dalam Nazara, 1994:22) model di atas diperbaiki dengan memecah *total factor productivity* dengan cara memasukkan variabel lain, yang dapat menjelaskan pertumbuhan. Model pertumbuhan ini selanjutnya disebut dengan model pertumbuhan endogen (*endogenous growth model*). Dalam model pertumbuhan endogen ini dicari variabel yang dapat dimasukkan untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Salah satu variabel yang dianggap dapat ikut menjelaskan pertumbuhan dari suatu ekonomi adalah variabel sumber daya manusia.

Pada tahap selanjutnya Solow berusaha memasukkan variabel perubahan teknologi dalam model pertumbuhan. Variabel perubahan teknologi ini menggambarkan kondisi pengetahuan masyarakat tentang

metode-metode produksi, dimana saat teknologi berkembang maka tingkat efisiensi tenaga kerja juga akan naik. Dengan adanya kemajuan teknologi, model Solow akhirnya bisa menjelaskan kenaikan yang berkelanjutan dalam standar kehidupan yang dialami oleh berbagai Negara. Model Solow menunjukkan bahwa kemajuan teknologi bisa mengarah ke pertumbuhan yang berkelanjutan dalam output per pekerja. Tingkat tabungan yang tinggi mengarah ke tingkat pertumbuhan yang tinggi hanya jika kondisi *steady-state* dicapai. Dengan penambahan variabel baru ini maka persamaan awal dari Solow berubah menjadi:

$$Y = f(K, L \times E)$$

Pada persamaan di atas E adalah variabel baru dari teknologi yang selanjutnya disebut dengan efisiensi tenaga kerja, sedangkan $L \times E$ menunjukkan jumlah tenaga kerja yang efektif. Fungsi produksi yang baru ini menyatakan bahwa jumlah output (Y) adalah tergantung pada jumlah unit modal (K) dan jumlah pekerja yang efektif ($L \times E$).

4. Teori Pertumbuhan Rostow

Menurut Rostow, pembangunan ekonomi adalah suatu transformasi masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern, melalui tahapan:

- a. Masyarakat tradisional, yaitu suatu masyarakat yang strukturnya berkembang di dalam fungsi produksi yang terbatas yang didasarkan pada teknologi dan ilmu pengetahuan dan sikap yang masih primitif, dan berfikir irasional.

- b. Prasyarat lepas landas, adalah suatu masa transisi di mana suatu masyarakat mempersiapkan dirinya atau dipersiapkan dari luar untuk mencapai pertumbuhan yang mempunyai kekuatan untuk terus berkembang (*selfsustained growth*).
- c. Lepas landas, adalah suatu masa di mana berlakunya perubahan yang sangat drastis dalam masyarakat seperti revolusi politik, terciptanya kemajuan yang pesat dalam inovasi, atau berupa terbentuknya pasar baru.
- d. Tahap kematangan, adalah suatu masa di mana suatu masyarakat secara efektif menggunakan teknologi modern pada sebagian besar faktor-faktor produksi dan kekayaan alam.
- e. Masyarakat berkonsumsi tinggi, adalah suatu masyarakat di mana perhatiannya lebih menekankan pada masalah konsumsi dan kesejahteraan masyarakat, bukan lagi pada masalah produksi.

5. Teori Pertumbuhan Mantap Harrod-Domar

Harrod-Domar adalah ahli ekonomi yang mengembangkan analisis Keynes yang menekankan tentang perlunya penanaman modal dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi (Arsyad, 1999:58). Oleh karena itu menurutnya setiap usaha ekonomi harus menyelamatkan proporsi tertentu dari pendapatan nasional yaitu untuk menambah stok modal yang akan digunakan dalam investasi baru. Menurut Harrod-Domar, ada hubungan

ekonomi yang langsung antar besarnya stok modal dan jumlah produksi nasional.

6. Teori Pertumbuhan Modern

Menurut Kuznet, pertumbuhan ekonomi adalah kemampuan jangka panjang untuk menyediakan berbagai jenis barang yang tumbuh atas dasar kemajuan teknologi, kelembagaan dan ideologis. Menurut Kuznet (dalam Jhingan:2000:73), terdapat enam ciri pertumbuhan ekonomi yang berdasarkan pada produk nasional dan komponennya, yaitu: 1) laju pertumbuhan penduduk dan produk perkapita, 2) peningkatan produktivitas, 3) laju perubahan struktural yang tinggi, 4) urbanisasi, 5) ekspansi negara maju, dan 6) arus barang, modal dan orang antar bangsa.

Pada sekitar tahun 1980 Romer memperkenalkan tentang teori pertumbuhan ekonomi baru (*New Growth Theory*). Teori pertumbuhan baru pada dasarnya merupakan teori pertumbuhan endogen yang lahir sebagai respon dan kritik terhadap model pertumbuhan ekonomi Neo-Klasik Solow. Teori pertumbuhan endogen (*endogeneous growth theory*) menjelaskan bahwa investasi pada modal fisik dan modal manusia berperan dalam menentukan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kontribusi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan melalui pengaruhnya dalam melakukan perubahan konsumsi atau pengeluaran untuk investasi public dan penerimaan dari pajak. Kelompok teori ini juga menganggap bahwa keberadaan infrastruktur, hukum dan peraturan, stabilitas politik, kebijakan pemerintah, birokrasi, dan dasar

tukar internasional sebagai faktor penting yang juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Teori ini memberikan kerangka teoritis untuk menganalisis pertumbuhan endogen karena menganggap pertumbuhan GNP lebih ditentukan oleh sistem proses produksi dan bukan berasal dari luar sistem. Motivasi dasar dari teori NGT adalah menjelaskan perbedaan tingkat pertumbuhan negara dari proporsi yang lebih besar dari pertumbuhan yang diamati.

Persamaan teori endogen dapat dituliskan dengan $Y=AK$. Dalam formulasi ini, A adalah faktor yang mempengaruhi teknologi, K adalah modal fisik dan modal manusia. Perlu diperhatikan bahwa tidak ada hasil yang menurun (*diminishing returns*) atas capital dalam formula tersebut. Akibatnya kemungkinan yang bisa terjadi adalah investasi dalam modal-modal fisik dan manusia dapat menghasilkan penghematan eksternal dan peningkatan produktifitas yang melebihi penghasilan yang cukup untuk menutup *diminishing returns*. Implikasi dari penekanan terhadap pentingnya tabungan dan investasi pada modal oleh teori NGT adalah tidak ada kekuatan yang menyamakan tingkat pertumbuhan antarnegara, serta tingkat pertumbuhan nasional yang konstan dan tingkat teknologi. Konsekuensinya, bagi negara yang miskin modal manusia dan fisik sulit untuk menyamai tingkat pendapatan per kapita negara yang kaya capital, walaupun memiliki tingkat tabungan nasional yang sama besar.

Rahardja (2001:152) menjelaskan dalam teori ini disebut bahwa teknologi bersifat endogenus. Hal ini karena teknologi dianggap sebagai faktor produksi tetap (*fixed input*) sehingga mengakibatkan terjadinya *The Law of Diminishing Return*. Dalam jangka panjang yang lebih serius dari memperlakukan teknologi sebagai faktor eksogen dan konstan adalah perekonomian yang lebih dulu maju akan terkejar oleh perekonomian yang lebih terbelakang dengan asumsi bahwa tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat tabungan dan akses terhadap teknologi adalah sama. Teknologi merupakan barang publik. Artinya teknologi dapat dimiliki dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat walaupun bukan si penemu teknologi tersebut dan tanpa mengeluarkan biaya riset atau penelitian. Sehingga dalam hal ini teknologi disebut sebagai faktor endogen.

7. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/propinsi dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga yang berlaku atau atas dasar harga konstan. PDRB oleh Sukirno (2004:17) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam satu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahunnya. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah

barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomis. Sedangkan harga konstan digunakan untuk mengetahui pertambahan ekonomi dari tahun ke tahun.

Ada tiga pendekatan yang digunakan dalam menghitung PDRB yaitu:

a. Pendekatan produksi

Menurut pendekatan ini, PDRB dihitung melalui akumulasi nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi yang berada di suatu wilayah/propinsi dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit produksi tersebut dikelompokkan kedalam 9 lapangan usaha:

- 1) pertanian;
- 2) pertambangan dan penggalian;
- 3) industri pengolahan;
- 4) listrik, gas dan air bersih;
- 5) bangunan;
- 6) perdagangan, hotel dan restoran;
- 7) angkutan dan komunikasi;
- 8) keuangan, persewaan dan jasa perusahaan;
- 9) jasa-jasa.

b. Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini, merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam waktu tertentu.

c. Pendekatan pengeluaran

PDRB adalah semua komponen pengeluaran aktif seperti pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan stok, dan ekspor neto dalam jangka waktu tertentu.

Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian regional setiap tahun. Manfaat yang didapat atau diperoleh adalah (Kuncoro, 2004:110):

d. PDRB harga berlaku/nominal

- 1) Menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah/propinsi. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar pula.
- 2) Menunjukkan pendapatan yang memungkinkan dapat dinikmati oleh penduduk suatu wilayah/propinsi.

e. PDRB harga konstan

- 1) Menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan/ setiap sektor ekonomi dari tahun ke tahun.
- 2) Mengukur laju pertumbuhan konsumsi, investasi dan perdagangan luar negeri, perdagangan antara pulau/antar propinsi.

C. Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan daerah berasal dari penerimaan dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah. PAD (Pendapatan Asli Daerah) merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang terdiri atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak berupa penerimaan hasil Perusahaan Milik Daerah, serta pos penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam (Bastian, 2002). Menurut Halim (2007) Pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Widjaja (2007:42), pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi).

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintahan daerah. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dan digali dari potensi pendapatan yang ada di daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 3 ayat 1 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dinyatakan bahwa PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Berdasarkan tujuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah semata-mata ditujukan untuk pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah agar hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Artinya, semakin besar dana PAD yang diperoleh oleh daerah akan sebanding dengan laju pembangunan di daerah tersebut.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar didapatkan dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Dimana bahwa pajak daerah adalah pemungutan pemerintah daerah pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) terhadap orang atau badan berdasarkan peraturan daerah yang berlaku guna pembiayaan rumah tangga daerahnya. Sedangkan pengertian retribusi daerah dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah atau pembayaran tersebut didasarkan atas prestasi atau pelayanan yang diberikan Pemerintah daerah yang langsung dinikmati secara perseorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan.

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) berkaitan langsung dengan upaya daerah dalam menggali dan meningkatkan sumber pendapatan

daerah, terutama pemasukan yang berasal dari PAD. Selain itu Dispenda bertugas sebagai koordinator pengelolaan pendapatan daerah, sehingga dapat dikatakan bahwa Dispenda merupakan ujung tombak pelaksana otonomi daerah dalam mengurus dan mengatur keuangan daerah. Namun tidak semua Retribusi Daerah pengelolaannya dilakukan oleh Dispenda. Di Surabaya Retribusi Pasar Pengelolaannya dilakukan oleh Perusahaan Daerah Pasar Surya (PD Pasar Surya). Dan Dispenda Kota Surabaya hanya mendapat devidennya saja.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dijelaskan: "Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan". Salah satu pungutan retribusi daerah adalah retribusi pasar. Retribusi pasar ini termasuk dalam retribusi jasa umum yang memberikan kontribusi yang cukup potensial terhadap peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat. Retribusi pasar memberikan banyak manfaat baik untuk pengguna pasar maupun untuk pemerintah daerah itu sendiri. Manfaat retribusi bagi para pengguna pasar antara lain untuk memenuhi serta meningkatkan pelayanan dalam hal penyediaan, penggunaan dan perawatan fasilitas pasar yang berupa

halaman atau pelataran, kios dari pemerintah. Sedangkan manfaat retribusi pasar untuk pemerintah daerah adalah sebagai salah satu sumber pemasukan retribusi daerah yang cukup potensial untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang digali oleh pemerintah daerah melalui usaha-usaha yang dilakukan. Kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan (Halim, 2002:32), yaitu:

3. Pajak Daerah

a. Timbulnya Pajak Daerah

Timbulnya pajak daerah dikarena adanya pelaksanaan desentralisasi yang menimbulkan daerah-daerah otonom yang membedakan kemungkinan bagi pelaksanaan asas tugas pembantuan. Dengan keberadaan otonomi tersebut maka setiap daerah diberi hak dan wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri termasuk salah satunya adalah pengurusan tentang Pajak Daerah.

b. Pengertian pajak

Pajak Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Menurut Rahmat Soemitro (dalam Abdul Halim, 2004:129), adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa, timbal balik (*kontraprestasi*) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membanyar pengeluaran umum”

Pengertian pajak daerah menurut UU No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan UU No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan yang seimbang yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

c. Ciri – ciri Pajak Daerah

Menurut Kaho (1990:30), ciri-ciri Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Pajak Daerah adalah berasal Pajak Negara yang diserahkan kepada daerah sebagai Pajak Daerah.
- 2) Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang.
- 3) Pajak Daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang atau peraturan hukum lainnya.
- 4) Hasil pungutan Pajak Daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran sebagai badan hukum publik.

4. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah. Dalam struktur APBD baru dengan pendekatan kinerja, jenis pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan UU No.34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dirinci menjadi:

- a. Pajak Provinsi. Pajak ini terdiri atas: (i) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, (ii) Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan kendaraan di atas air, (iii) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan (iv) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
- b. Jenis pajak Kabupaten/kota. Pajak ini terdiri atas: (i) Pajak Hotel, (ii) Pajak Restoran, (iii) Pajak Hiburan, (iv) Pajak Reklame, (v) Pajak penerangan Jalan, (vi) Pajak pengambilan Bahan Galian Golongan C, (vii) Pajak Parkir.
- c. Retribusi. Retribusi ini dirinci menjadi: (i) Retribusi Jasa Umum, (ii) Retribusi Jasa Usaha, (iii) Retribusi Perijinan Tertentu.

1) Ciri-ciri Retribusi Daerah :

Menurut Kaho (1996:119), ciri-ciri pokok dari Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

- a) Retribusi dipungut oleh daerah
- b) Dalam pemungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah secara langsung dapat ditunjuk.

- c) Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan atau mengeyam jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah
- 2) Jenis-jenis Retribusi Daerah
 - a) Retribusi Jasa Umum
 - b) Retribusi Jasa Usaha
 - c) Retribusi Perijinan tertentu
 - 3) Tolak Ukur menilai Pajak dan Retribusi Daerah
 - a) Hasil (*yield*)
 - b) Keadilan
 - c) Daya Guna Ekonomi
 - d) Kemampuan melayani
 - e) Kecocokan daerah sebagai sumber penerimaan daerah

5. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan

Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

- a) Bagian laba perusahaan milik daerah.
- b) Bagian laba lembaga keuangan bank.
- c) Bagian laba lembaga keuangan non bank.
- d) Bagian laba atas pernyataan modal/investasi.

6. Lain-lain PAD yang Sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

- a) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan.
- b) Penerimaan jasa giro.
- c) Penerimaan bunga deposito.
- d) Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- e) Penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan daerah (TP-TGR).

D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Efektivitas dan Efisiensi keuangan daerah adalah kekuatan disuatu daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan tertentu. Untuk melihat Efektivitas dan Efisiensi sumber penerimaan daerah dibutuhkan faktor-faktor yang dapat dikendalikan (yaitu faktor-faktor kebijakan dan kelembagaan) dan yang tidak dapat dikendalikan (variabel-variabel ekonomi) yang dapat mempengaruhi kekuatan sumber-sumber penerimaan daerah. Menurut (Wihana Kirana: 2002) beberapa faktor tersebut adalah :

1. Kondisi Awal Suatu Daerah

Keadaan struktur ekonomi dan dan sosial suatu daerah menentukan: besar kecilnya keinginan pemerintah untuk menetapkan pungutan-pungutan, struktur ekonomi dan sosial suatu daerah juga

menentukan kemampuan masyarakat untuk membayar segala pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah daerahnya. Kondisi awal ini mencakup pengetahuan akan: komposisi industri yang ada di daerah, struktur sosial dan politik, kemampuan administratif, tingkat ketimpangan dalam distribusi pendapatan.

2. Peningkatan Cakupan

Kegiatan ini merupakan upaya memperluas cakupan penerimaan pendapatan. Usaha peningkatan cakupan ini, ada tiga hal yang perlu diperhatikan yang meliputi menambah objek atau subjek retribusi, meningkatkan besarnya penetapan, mengurangi tunggakan.

3. Perkembangan PDRB

Semakin tinggi pendapatn seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah. Logika yang sama, pada tingkat distribusi pendapatan tertentu tetap, semakin tinggi PDRB perkapita riil, semakin besar pula kemampuan masyarakat untuk membiayai pengeluaran rutin. Semakin tinggi PDRB perkapita riil suatu daerah semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut.

4. Pertumbuhan Penduduk

Besarnya pendapatan dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Bila jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang dapat ditarik akan

meningkat tetapi pertumbuhan penduduk tidak mempengaruhi pertumbuhan pendapatan secara proporsional.

5. Tingkat Inflasi

Inflasi akan meningkatkan penerimaan pajak atau retribusi yang penetapannya didasarkan pada omzet penjualan. Pada pajak atau retribusi yang penetapannya didasarkan pada tarif secara flat, maka inflasi diperlukan dalam pertimbangan perubahan tarif.

6. Penyesuaian Tarif

Peningkatan pendapatan sangat tergantung pada kebijakan penyesuaian tarif. Penyesuaian tarif perlu mempertimbangkan laju inflasi. Kegagalan menyesuaikan tarif dengan laju inflasi akan menghambat peningkatan pendapatan.

7. Pembangunan Baru

Penambahan pendapatan diperoleh bila ada pembangunan baru. Misal pembangunan pasar, pembangunan terminal.

8. Sumber Pendapatan Baru

Adanya kegiatan yang mengakibatkan bertambahnya sumber pendapatan pajak atau retribusi yang sudah ada.

E. Penelitian Terdahulu

Esti Purwaningsih (2011) dengan judul penelitian Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Hasil Daerah Di Kabupaten Sragen Tahun 1991-2008. Dengan kesimpulan:

1. Hasil Analisis Deskripsi

Pertumbuhan PAD, pertumbuhan pendapatan perkapita, pertumbuhan jumlah perusahaan dan pertumbuhan jumlah penduduk selama tahun 1991-2008 selalu meningkat tetapi pada tahun 1998 mengalami pertumbuhan negatif dikarenakan perekonomian indonesia tergoncang dengan adanya krisis ekonomi yang berakibat pada perekonomian mikro maupun makro.

2. Secara bersama-sama pendapatan perkapita, jumlah perusahaan dan jumlah penduduk berpengaruh terhadap PAD. Secara individu pengujian hipotesis menunjukkan bahwa:

- a. Variabel pendapatan perkapita berpengaruh signifikan positif terhadap PAD. Apabila pendapatan perkapita naik maka PAD akan naik dan sebaliknya.
- b. Variabel jumlah perusahaan tidak berpengaruh terhadap PAD. Apabila jumlah perusahaan naik/turun maka PAD akan tetap.
- c. Variabel jumlah penduduk berpengaruh signifikan negatif terhadap PAD. Apabila jumlah penduduk naik maka PAD akan turun dan sebaliknya.

- d. Variable yang paling dominan pengaruhnya terhadap PAD adalah pendapatan perkapita.

Juwanto (2014) dengan Judul penelitian Pengelolaan Pendapatn Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Di Kabupaten Sragen Periode 2009 - 2012. Kesimpulannya:

1. Implementasi pengaturan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tahun 2009 – 2012 sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 12 tahun 2008 Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah kemudian UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kemudian dalam pelaksanaannya dilapangan Dinas Pendapatan Daerah Sragen pada khususnya sudah menjalankan Asas-Asas Umum Pemerintah yang Layak sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan publik. Hal ini dibuktikan dengan adanya Asas keterbukaan, Asas Kepentingan Umum dan Transparansi Pelayanan. Penerimaan dana untuk wilayah Kabupaten Sragen masih terdapat 2 pengelolaan dana yakni Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang mana kedua kedua hal tersebut mempunyai peranan yang sangat penting terhadap perkembangan pembangunan daerah. Sumber penerimaan daerah Kabupaten Sragen tahun 2009-2012 dalam konteks otonomi dan

desentralisasi untuk saat ini masih didominasi oleh bantuan dan sumbangan dari pemerintah pusat baik dalam bentuk DAU, Dana Alokasi Khusus dan bagi hasil. Sedangkan porsi DAK masih relative kecil. Secara rata-rata nasional, PAD hanya memberikan kontribusi 8-10% dari total penerimaan daerah, sedangkan yang kurang lebih 90% masih menggantungkan sumbangan dari bantuan pemerintah pusat. Hasil penelitian ini juga menunjukkan sumber daya aparat, prosedur pengelolaan, dan Pelaksanaan Otonomi Daerah belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari target dan realisasi yang dicapai untuk empat tahun terakhir pada empat wilayah sampel, dimana terjadi kesenjangan antara target dan realisasi yang dicapai, atau dengan kata lain bahwa realisasi yang dicapai tidak mencapai target yang ditentukan, begitu pula kontribusinya terhadap APBD masih sangat kecil. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa masalah yang dihadapi, seperti kualitas Sumber Daya Aparat yang masih sangat rendah dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang kurang maksimal.

2. Dalam pengelolaan PAD Kabupaten Sragen peneliti menyimpulkan terdapat beberapa kendala yang timbul dalam upaya pemerintah daerah menjalankan tugasnya antara lain a) Sistem Otonomi Daerah dan pemerintah umum yang belum maksimal dalam mengelola potensi daerah guna peningkatan PAD. b) Administrasi keuangan daerah yang belum mandiri sehingga belum mampu membiayai sebagian besar pembangunan daerah untuk peningkatan pendekatan daerah. c) Kurangnya pengetahuan

masyarakat desa tentang pelayanan publik yang sudah disediakan oleh Pemerintah Daerah, dan d) kurangnya pemberdayaan masyarakat khususnya didesa.

Cherrya Dhia Wenny (2012) dengan judul Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Propinsi Sumatera Selatan. Kesimpulan penelitian yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan, artinya keseluruhan dari komponen PAD sangat mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah. Penelitian juga dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial terhadap kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan. Hasilnya menyatakan bahwa secara parsial hanya lain-lain PAD yang sah yang secara dominan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil perusahaan dan kekayaan daerah tidak dominan mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Abdullah, Dri dan Febri meneliti dengan judul jurnal Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Bagian

Selatan. Berdasarkan hasil penelitian, maka bisa diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Sumatera Bagian Selatan periode 2011-2013. Hal ini menunjukkan bahwa pola manajemen pemerintah daerah kabupaten/kota se-Sumatera Bagian Selatan mempertimbangkan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai salah faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan.
2. Dana alokasi umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Sumatera Bagian Selatan periode 2011-2013. Hal ini menunjukkan bahwa pola manajerial pemerintah daerah kabupaten/kota se-Sumatera Bagian Selatan tidak mempertimbangkan dana alokasi umum (DAU) sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan.
3. Dana alokasi khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Sumatera Bagian Selatan periode 2011-2013. Hal ini menunjukkan bahwa pola manajemen pemerintah daerah kabupaten/kota se-Sumatera Bagian Selatan tidak mempertimbangkan dana alokasi khusus (DAK) sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan.

Anes Lilia Kusumastuti, S.Kom (2012), dengan judul penelitian Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Pada

Indeks Pembangunan Manusia Di Wilayah Tapal Kuda Jawa Timur. Dapat disimpulkan Jawa Timur sebagai salah satu kawasan strategis dalam perekonomian nasional selalu menarik untuk dicermati. Jawa Timur memiliki peran yang sangat penting bagi perekonomian nasional. Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi Jatim tahun 2007-2011 yang meningkat rata-rata 6,19% per tahun. Tahun 2011 pertumbuhan ekonomi Jatim mampu mencapai 7,2 persen di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 6,50%. Namun yang menjadi pertanyaan dengan keberhasilan tersebut adalah bahwa apakah sudah bisa dinikmati secara merata, disamping itu meningkatnya pertumbuhan ekonomi apakah sudah mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai tujuan pembangunan Indonesia. fokus pembangunan suatu negara adalah penduduk karena penduduk adalah kekayaan suatu negara. Konsep atau definisi pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas, tidak hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi.

Luigi, Derosario dan Vecky, judul penelitiannya Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di kota Jayapura (2017). Kesimpulan:

1. Perkembangan pendapatan asli daerah di kota jayapura sejak tahun awal penelitian hingga tahun akhir penelitian terus mengalami pertumbuhan yang positif dan bahkan pertumbuhan yang terjadi terus meningkat setiap tahunnya hal ini tentu menjadi gambaran bahwa penerimaan daerah di

Kota Jayapura terlebih khusus dalam bentuk pendapatan asli daerah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

2. Efektivitas penerimaan daerah terlebih pendapatan asli daerah terus menerus menunjukkan angka yang positif setiap tahunnya, bahkan selalu menunjukkan angka efektivitas di atas 100 % setiap tahunnya, hal ini jelas menjadi gambaran bahwa pemerintah kota Jayapura terus mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya. Bukan hanya untuk bisa mencapai target anggaran pendapatan bahkan melampaui target yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah, sedangkan Kemandirian kota Jayapura dalam hal penerimaan memang masih tergolong amat kecil, bahkan pada tahun awal penelitian berada pada angka dibawah 10 % dan angka kemandirian tertinggi masih berada pada angka 18 %, ini menunjukkan meskipun pendapatan asli daerah kota Jayapura terus tumbuh positif setiap tahunnya namun hal ini belum menjanjikan kemandirian karena pendapatan daerah dari alokasi anggaran pemerintah pusat masih amat besar.

Narlia dan Farida (2014), dengan judul jurnal Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. Kesimpulan dari jurnal Simpulan hasil penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut: (1) Pengelolaan Retribusi Pasar di Kota Surabaya sepenuhnya merupakan wewenang dan tanggung jawab Perusahaan Daerah Pasar Surya (PD Pasar Surya); (2) Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis kontribusi yang diberikan oleh Retribusi Pasar terhadap

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pemerintah Kota Surabaya; (3) Pelaksanaan retribusi pasar pada tiga tahun terakhir berjalan dengan baik dan selalu melebihi target yang telah ditetapkan. Pada tahun anggaran tersebut terdapat kelebihan penerimaan sebesar Rp.48.049.228; (4) Pertumbuhan Retribusi Pasar pada tahun 2011 sampai dengan 2013 terus mengalami kenaikan, hal ini disebabkan kesadaran wajib retribusi dikalangan pedagang pasar dan pengelolaan yang baik oleh pihak Perusahaan Daerah Pasar Surya Kota Surabaya; (5) Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Retribusi Daerah Kota Surabaya dari tahun 2011 sampai dengan 2013 terus mengalami fluktuasi dengan kontribusi rata-rata sebesar 22,07%; (6) Kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya pada tahun 2011 sampai dengan 2013 terus mengalami penurunan dengan presentase rata-rata sebesar 2,01%; (7) Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Daerah Kota Surabaya pada tahun 2011 sampai dengan 2013 sangat kecil dengan rata-rata sebesar 0,010%; (8) Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Kota Surabaya pada tahun 2011 sampai dengan 2013 memberikan kontribusi yang cukup terhadap Pendapatan Daerah dengan rata-rata presentase sebesar 50,87%; (9) Kendala yang dihadapi PD Pasar Surya dalam pelaksanaan retribusi pasar adalah Keterlambatan pembayaran iuran harian maupun bulanan, Herregistrasi, dan lain-lain sesuai jenis iuran/biaya, kurang disiplin SDM dalam implementasinya di beberapa ataupun setiap unit kerja, petugas kurang tegas dalam memungut retribusi; (10) Dan upaya agar kendala tersebut dapat berjalan dengan baik adalah Memperbaiki dan meningkatkan

sarana dan prasarana pasar, mengadakan Sosialisasi, pemberian sanksi bagi yang melanggar.

Tri, Toto dan Saimul, dengan judul penelitian Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Perkembangan Ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2000-2013. Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis dapat disimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Investasi Pemerintah (Belanja Modal Pertenaga Kerja) periode 2000-2013 memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung.
2. Investasi Swasta (Realisasi PMA dan PMDN Pertenaga Kerja) periode 2000-2013 memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung.
3. Penerimaan Asli Daerah (PAD Pertenaga Kerja) periode 2000-2013 memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung.

Dino Rian Verri Susetyo (2014), dengan judul penelitian Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Survey Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah). Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, peneliti mendapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil analisis uji t diperoleh sebagai berikut :

- H1 : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal. Memiliki hasil yaitu variabel PDRB diketahui nilai thitung (-1,267) lebih kecil daripada ttabel (2,021) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,212 > \alpha = 0,05$. Oleh karena itu, H1 ditolak, artinya Pertumbuhan Ekonomi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil pengujian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan Darwanto dan Yulia Yustikasari, bahwa variabel pertumbuhan ekonomi (PDRB) kurang atau tidak berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal.
- H2 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal. Memiliki hasil pengujian yaitu variabel PAD diketahui nilai thitung (-1,253) lebih kecil daripada ttabel (2,021) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,217 > \alpha = 0,05$. Oleh karena itu, H2 ditolak, artinya PAD tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Darwanto dan Yulia Yustikasari serta Kusnandar dan Dodik Siswanto, bahwa PAD memiliki pengaruh terhadap pengalokasian belanja modal.
- H3 : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal. Memiliki hasil

pengujian yaitu variabel DAU diketahui nilai thitung (2,597) lebih besar daripada ttabel (2,021) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,013 < \alpha = 0,05$. Oleh karena itu H3 diterima, artinya secara DAU mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil pengujian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh David Harianto dan Priyo Hari Adi bahwa secara positif dan signifikan DAU berpengaruh terhadap perubahan belanja modal, tetapi bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Kusnandar dan Dodik Siswanto dengan hasil penelitian secara parsial DAU tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

2. Hasil perhitungan untuk nilai koefisien determinasi (R²) dengan adjusted-R² sebesar 0,121. Hal ini berarti bahwa 12,1% variasi variabel belanja modal dapat dijelaskan oleh variabel Pertumbuhan Ekonomi, PAD, dan DAU sedangkan sisanya yaitu 87,9% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model yang diteliti.

Pungky Ardhani (2011), judul penelitian Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). Isi penelitian Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* perkapita diproduksi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita (Boediono, 1985). Satu-satunya ukuran yang paling penting dalam konsep ekonomi adalah produk domestik

bruto (PDB) yang mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu negara atau nasional. PDRB untuk mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu daerah atau lokal. Berdasarkan pengertian tersebut, peneliti menggunakan PDRB sebagai alat ukur untuk menilai pertumbuhan ekonomi.

Tabel 1.

Daftar Hasil Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul Penelitian	Metode Penelitian dan Variabel yang Digunakan	Hasil Penelitian
1.	Esti Purwaningsih (2011)	Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Di Kab. SRAGEN Tahun 1991-2008	b. Variabel Independen c. Variabel dependen	Pendapatan perkapita berpengaruh terhadap PAD, semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar (<i>ability to pay</i>) berbagai pungutan-pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah. Meningkatkan produk domestik dengan menambah terobosan, usaha-usaha pada pertanian, industri, perbankan, jasa-jasa, perdagangan dan menekankan tingkat

				pertumbuhan penduduk.
2.	Juwanto (2014)	Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Di Kab. Sragen Periode 2009-2012	Penelitian <i>field research</i> , dan menggunakan metode penelitian kualitatif	Pemerintah Daerah khususnya Dina Pendapatan Asli Daerah agar lebih tegas dalam pemberian sanksi atau denda yang akan diberikan kepada pihak-pihak yang belum melakukan pembayaran tau sengaja mengulur-ulur waktu untuk membayar distribusi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang, hal ini dimaksudkan agar sumber pendapatan daerah bisa meningkat setiap tahunnya karena tidak ada yang melanggar aturan.
3.	Cherry Dhia Wenny (2012)	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Propinsi Sumatera Selatan	Penelitian Kuantitatif dan metode analisis statistik dengan menggunakan software SPSS 17.	Berdasarkan hasil pengujian mengenai pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan menggunakan SPSS versi 17, diketahui bahwa secara simultan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan, namun, secara parsial hanya lain-lain PAD yang sah yang secara

				<p>dominan berpengaruh terhadap kinerja keuangan, sedangkan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil perusahaan dan kekayaan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.</p> <p>Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa besarnya nilai <i>Adjusted R Square</i> sebesar 0,396 menunjukkan 39,6% variasi atau perubahan dalam kinerja dapat dijelaskan oleh variasi dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan dan kekayaan daerah, serta lain-lain PAD yang sah, sedangkan sisanya 60,4% dijelaskan oleh sebab-sebab lain.</p>
4.	Abdullah, Dri Asmawanti S., dan Febriansyah (2015)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Bagian Selatan	Penelitian Kuantitatif dan dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Bagian Selatan yang berjumlah 58 kabupaten dan kota yang memiliki	Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Julitawati (2012), yang menunjukkan bahwa PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian Sihite (2010) yang

			<p>laporan keuangan yang terbaru yaitu tahun 2011-2013, dengan objek penelitian berupa laporan realisasi anggaran yang terdaftar di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Perimbangan Pemerintah Daerah. Teknik dalam pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik pengumpulan data secara <i>Purposive Sampling</i>.</p>	<p>menyimpulkan bahwa PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan di Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara. Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian Yunita (2008) yang menyatakan bahwa rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.</p>
5.	Anes Lilia Kusumastuti, S.Kom (2012)	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan dana alokasi khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Pada Indeks Pembangunan	menggunakan <i>Explanatory Research</i> , yaitu metode yang mempunyai tujuan untuk mencari dan dan menjelaskan ada atau tidaknya pola hubungan antara dua	Sumber PAD yang berasal dari total pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengolahan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah masing-masing

		Manusia Di Wilayah Tapal Kuda Jawa Timur	peubah atau lebih.data sekunder berupa laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2002-2011.	kabupaten/kota wilayah tapal kuda Jawa Timur (dalam jutaan rupiah);
6.	Luigi Laurens Derosario Berwulo1 ,Vecky A. J Masinambow2 , Patrick C. Wauran3 (2017)	Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Jayapura	Penelitian deskriptif	<p>Pendapatan asli daerah (PAD) kota Jayapura sepanjang tahun penelitian yang dilakukan atau sepanjang tahun 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014 terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Selain pertumbuhan yang terus membaik setiap tahunnya namun tingkat kemandirian di kota Jayapura sendiri masih tergolong rendah bahkan belum mencapai angka 20 % tingkat kemandirian. Angka tertinggi pada akhir tahun penelitian yang bias dicatat berada pada angka 18 %.</p> <p>Ini merupakan gambaran bahwa meskipun pertumbuhan yang positif terus terjadi setiap tahunnya di kota Jayapura namun tingkat pertumbuhan ini</p>

				<p>belum begitu signifikan jika dibandingkan dengan pertumbuhan akan pendapatan atau besaran dari jumlah pendapatan dari pihak eksteren sehingga tingkat kemandirian kota Jayapura masih amat kecil. Terlepas dari tingkat pertumbuhan yang semakin baik tiap tahunnya, pendapatan asli daerah belum mampu menunjang sepenuhnya pengeluaran pemerintah kota jayapura dalam membiayai anggaran rumah tangganya. Namun apabila melihat pada rasio efektivitas yang ada dalam mendapatkan PAD, maka dapat dilihat bahwa efektivitas pemerintah kota Jayapura dalam mendapatkan PAD sudah amat baik bahkan dalam rasio selalu menunjukkan angka diatas 100 %, atau bisa diartikan bahwa pendapatan asli daerah yang diterima oleh pemerintah kota Jayapura selalu</p>
--	--	--	--	---

				lebih banyak atau selalu di atas dari target yang sudah ditetapkan sebelumnya.
7.	Narlia Damayanti, Farida Idayati (2014)	Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya	metode kualitatif secara deskriptif yang menggambarkan keadaan yang telah diteliti dan menyajikan apa adanya data yang diperoleh, kemudian membuat kesimpulan untuk memberikan alternative pemecahannya.	Analisis target dan realisasi retribusi pasar digunakan untuk menghitung tingkat pencapaian retribusi pasar yaitu menghitung apakah realisasi retribusi pasar sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Berikut adalah hasil presentase Retribusi Pasar dimulai pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 dengan cara perhitungan realisasi Retribusi Pasar : Target Retribusi Pasar x 100%. Penerimaan retribusi pasar atau yang dalam PD Pasar Surya disebut Iuran Pasar dalam tiga tahun terakhir rata-rata sebesar Rp.45.629.090.992 dengan penerimaan tertinggi pada tahun anggaran 2013, yaitu sebesar Rp.47.585.095.450 dan penerimaan terendah pada tahun anggaran 2011 sebesar Rp.44.213.687.316. Untuk memberi

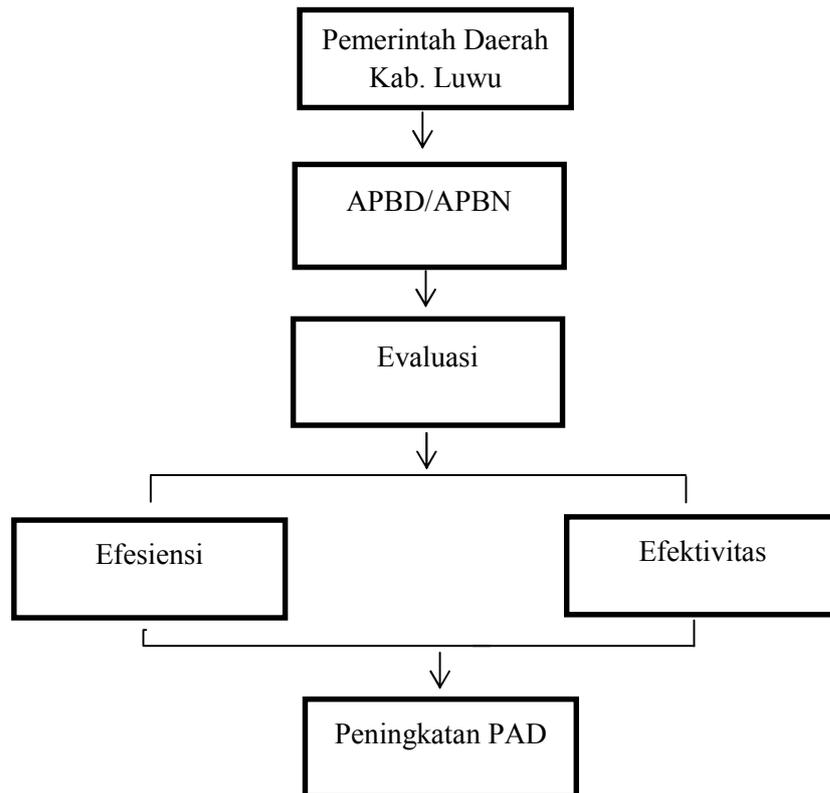
				gambaran yang lebih jelas, berikut ini disajikan perincian target dan realisasi masing-masing tahun anggaran.
8.	Tria Dessi Putri, Toto Gunarto, dan Saimul	“Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Perkembangan Ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2000-2013”	jenis penelitian kuantitatif , jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data tahunan dari periode 2000-2013.	Dari hasil analisis diketahui bahwa pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah secara statistik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung, dengan koefisien sebesar -0.4460 hal ini mengindikasikan bahwa semakin besarnya Pendapatan Asli Daerah yang diterima Provinsi Lampung memberi pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pendapatan Asli Daerah menurut Mardiasmo dalam Fisanti (2013) menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dari sumber yang terlihat

				bahwa penarikan pajak dan retribusi daerah justru berakibat pada output daerah yang tercermin pada PDRB yang dihasilkan berbagai sektor pendapatan di Provinsi Lampung tidak berjalan secara maksimal.
9.	Dino Rian Verri Susetyo (2014)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Survey Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah)	menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> yang merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.	Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan <i>output</i> perkapita dalam jangka panjang (Boediono, 1985). Pendapatan Asli Daerah (DAU) menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dana Alokasi Umum (DAU) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai

				kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
10.	Pungky Ardhani (2011)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah)	metode dokumentasi dari sumber data sekunder dengan mengumpulkan, mencatat, dan mengolah data yang berkaitan dengan penelitian.	Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007). Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan variabel-variabel yang ada pada penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007). Variabel-variabel yang digunakan diantaranya pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU). Selain itu peneliti juga menambahkan variabel independen lain dalam penelitiannya, yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK). Karena pada penelitian yang dilakukan oleh Anggiat Situngkir (2009) variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap belanja modal

F. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran teoritis dapat ditunjukkan oleh model gambar sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pikir

G. Hipotesis

Hipotesis dapat didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis di antara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji (Uma Sekaran, 2006). Hipotesis merupakan dasar yang kemudian membuat suatu teori yang masih diuji kebenarannya.

Berdasarkan rumusan masalah dan landasan teori yang dikemukakan, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah:

H₁ : Efektivitas, Efisiensi dan Laju Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kab. Luwu

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Rencana penelitian akan dilaksanakan pada Dinas Pendapatan Daerah yang beralamat di Desa Belopa, Kab. Luwu. Rencana penelitian ini akan dilaksanakan selama 2 bulan, terhitung dari bulan Maret sampai dengan bulan April. Penelitian ini dilakukan sesuai dengan waktu penelitian yang telah ditentukan.

B. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, cara-cara tersebut menunjuk pada sesuatu yang abstrak, tidak dapat diwujudkan dalam benda yang kasat mata, tetapi hanya dapat dipertontonkan penggunaannya. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Preliminary Survey

Preliminary survey merupakan *survey* pendahuluan yang dilakukan untuk mengetahui karakteristik, gambaran umum dan aktivitas perusahaan secara menyeluruh dan hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan. Teknik ini merupakan studi awal untuk mengetahui tentang system operasional perusahaan dan aspek internal organisasi perusahaan.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan literatur-literatur yang relevan dengan pembahasan penelitian yang dapat berupa buku dan tulisan-tulisan ilmiah. Data yang diperoleh dengan teknik ini adalah data sekunder tentang perusahaan.

3. Studi Lapang

Studi lapang dilakukan langsung ke objek penelitian dengan tujuan menggambarkan semua fakta yang terjadi pada objek penelitian, agar permasalahan dapat diselesaikan. Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dengan studi lapang adalah sebagai berikut :

a. Observasi/Pengamatan

Observasi/Pengamatan dilakukan untuk memperoleh data dengan cara mengamati aktivitas dan kondisi objek penelitian. Teknik ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai fakta dan kondisi di lapangan yang terdapat pada obyek penelitian, selanjutnya membuat catatan-catatan hasil pengamatan tersebut.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan melakukan pengumpulan data-data dan dokumen perusahaan yang relevan dengan penelitian ini.

C. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian ini menjelaskan fenomena-fenomena social yang ada

dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta. Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskripsi adalah untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Dalam melaksanakan penelitian, diperlukan data yang akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembahasan dan analisis. Yang dimaksud dengan data adalah segala keterangan (informasi) mengenai seluruh hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data kuantitatif. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer

Data primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus (Istijanto, 2006). Pada umumnya data primer ini sebelumnya belum tersedia, sehingga seorang peneliti harus melakukan pengumpulan sendiri data ini berdasarkan kebutuhannya.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data perusahaan yang bersumber dari catatan yang ada di Dinas Pendapatan Daerah. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen perusahaan yang terkait dengan masalah penelitian untuk mengetahui Keefektivitas, Keefesiensi dan Laju

Pertumbuhan PAD. Dari sumber lainnya yaitu dengan mengadakan studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan objek penelitian.

D. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif (*descriptive quantitative analysis method*), yaitu dengan menetapkan konsep perhitungan Rasio Keuangan dalam pengukuran kinerja keuangan, dengan menghitung *Rasio Keuangan* dari realisasi anggaran yang tertuang dalam APBD dan Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun Anggaran 2014-2016 yang dilakukan dengan cara:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Untuk mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah yang dapat mencerminkan kemampuan pemerintah daerah membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Dengan dasar perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/ Provinsi dan pinjaman}}$$

2. Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

1. Rasio Efektifitas

Untuk mengetahui tingkat efektifitas pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah dengan dasar perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD Yang Ditetapkan Berdasarkan Potensi Rill Daerah}}$$

2. Rasio Efisiensi

Untuk mengetahui tingkat efisiensi kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan. Dengan dasar perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Yang Dikeluarkan Untuk Memungut PAD}}{\text{Penerimaan PAD}}$$

3. Rasio Aktifitas (Rasio Keserasian)

Untuk mengetahui apakah pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Secara sederhana, rasio keserasian itu dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Rutin Terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}}$$

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}}$$

4. Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

Untuk mengetahui tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam membayar pinjaman/hutang. Dengan dasar perhitungan sebagai berikut:

$$DSCR = \frac{(PAD+BD+DAU)- BW}{\text{Total (pokok angsuran+bunga+ biaya pinjaman)}}$$

Dimana:

PAD = Pendapatan Asli Daerah

BD = Bagian Daerah

DAU = Dana Alokasi Umum

BW = Belanja Wajib

5. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan ini mengukur seberapa besar tingkat kemampuan Pemda dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian.

$$\text{Rasio Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD } x_n - x_{n-1}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD } x_{n-1}}$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan } \sum \text{Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Pertumbuhan } \sum \text{Pendapatan } x_n - x_{n-1}}{\text{Realisasi Pertumbuhan } \sum \text{Pendapatan } x_{n-1}}$$

Keterangan:

x_n = tahun yang dihitung

x_{n-1} = tahun sebelumnya

BAB 1V

GAMBARAN UMUM INSTANSI

A. Bentuk Putusan dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 2, Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan menurut Pasal 1 Ayat 3, pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, dan/atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah". Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi perangkat Daerah, pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sementara itu, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asa otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip NKRI.

Menurut Permendagri Nomor 21 tahun 2011 Pasal 1 ayat (8) Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Penetapan sistem anggaran dalam penyusunan anggaran dimulai dengan perumusan program dan penyusunan struktur organisasi pemerintah yang sesuai dengan program tersebut. Kegiatan tersebut mencakup pula penentuan unit kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program, serta penentuan indikator kinerja digunakan sebagai tolok ukur dalam mencapai tujuan program yang telah ditetapkan berdasarkan perencanaan yang telah dibuat. Secara rinci sistem dan prosedur ditetapkan oleh masing-masing daerah. Perbedaan dimungkinkan terjadi sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah. Dengan upaya tersebut, diharapkan daerah didorong untuk lebih tanggap, kreatif dan mampu mengambil inisiatif dalam perbaikan dan pembaharuan sistem dan prosedurnya serta meninjau kembali sistem tersebut secara terus-menerus berdasarkan keadaan, kebutuhan dan kemampuan setempat yang saling berhubungan dan saling ketergantungan bahkan mungkin dapat mempengaruhi satu dengan yang lainnya. sistem mencakup kegiatan penyusunan program dan tolok ukur kinerja yang sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Proses penyusunan APBD merupakan suatu kegiatan yang utuh dan terpadu yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada setiap tahun anggaran. Peraturan peraturan pemerintah mengenai keuangan daerah mengisyaratkan agar laporan

keuangan makin informatif, APBD terdiri dari tiga bagian yaitu penerimaan, pengeluaran dan pembiayaan. Pembiayaan merupakan kategori baru yang belum ada pada APBD di era Pra reformasi. Adanya pos pembiayaan merupakan upaya agar APBD makin informatif, yaitu memisahkan pinjaman dari pendapatan daerah, hal ini sesuai dengan definisi pendapatan sebagai hak Pemerintah Daerah, sedangkan pinjaman belum tentu menjadikan hak Pemerintahan Daerah.

Selain itu dalam APBD mungkin terdapat surplus atau defisit. Agar setiap SKPD dapat menyusun anggarannya, Pemerintah Daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan (PPKD) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah menerbitkan Pedoman Penyusunan Usulan Program, Kegiatan dan Anggaran SKPD berdasarkan prinsip-prinsip kinerja dengan Surat Edaran Kepala Daerah.

B. Sejarah Dinas Pendapatan Daerah

Dengan adanya keputusan Walikotamadya Keputusan Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 74/S/Kep/A/V1977 Tanggal 1 April 1977 bersama dengan surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 3/12/43 Tanggal 9 September 1975 dan Instruktur Menteri Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan tanggal 25 Oktober 1975 Nomor Keu/3/22/33 tentang pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya telah disempurnakan dan ditetapkan perubahan namanya menjadi Dinas Penghasilan Daerah yang kemudian menjadi unit-unit yang menangani sumber-sumber keuangan daerah seperti Dinas Perpajakan, Dinas Pasar dan Sub Dinas Pelelangan Ikan dan semua Sub-sub Dinas dalam unit penghasilan daerah yang tergabung dalam unit penghasilan daerah dilebur dan dimasukkan pada unit kerja Dinas

Pendapatan Daerah Kotamadya, seiring dengan adanya perubahan kotamadya, secara otomatis nama Dinas Pendapatan Daerah menjadi Dinas Pendapatan Kabupaten Luwu.

C. Visi dan Misi

1. Visi

a. Visi Badan Pendapatan Daerah

- 1) Badan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e, angka 2, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.

b. Visi Badan Pengelola keuangan Daerah

- 1) Badan Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e, angka 3, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintah bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.

2. Misi

a. Misi Badan Pendapatan Daerah

Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyelenggarakan Fungsi:

- 1) Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah.
- 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang pendapatan daerah.
- 3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang pendapatan daerah.

- 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang pendapatan daerah.
 - 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Misi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- 1) Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
 - 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
 - 3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

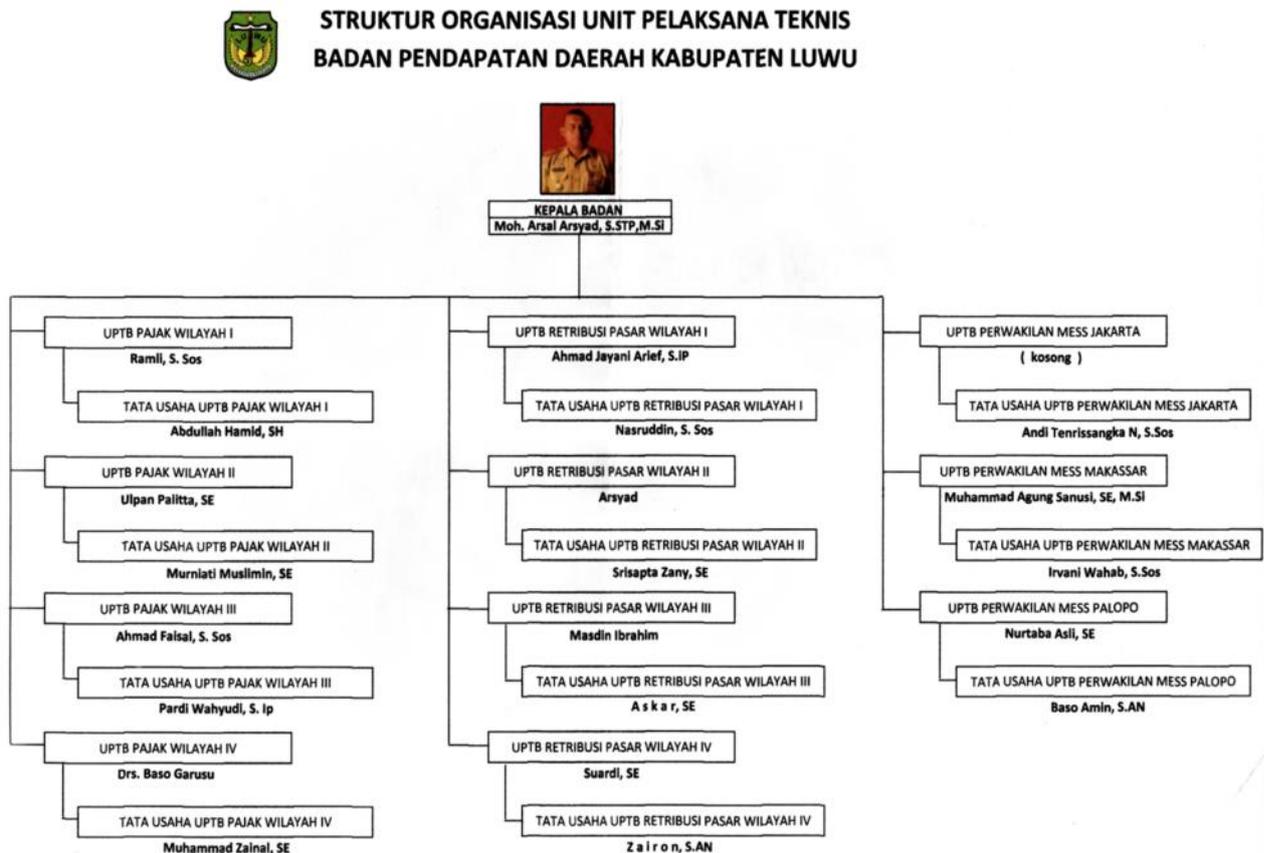
D. Struktur Organisasi

Pada suatu pencapaian tujuan organisasi perusahaan, diperlukan suatu struktur organisasi yang mana orang-orang dikoordinasikan tersusun dari sejumlah subsistem yang saling berhubungan dan bekerjasama atas dasar pembagian tugas dan wewenang serta mempunyai tujuan tertentu.

Struktur organisasi dibuat agar nampak jelas hubungan antara bagian dalam suatu organisasi baik fungsi maupun kedudukannya, hal ini bertujuan agar setiap bagian dapat bekerja sebaik mungkin sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Melihat struktur organisasi Dinas pendapatan daerah maka dapat dikatakan bahwa organisasi yang diterapkan oleh perusahaan ini adalah

organisasi garis. Pada organisasi seperti ini, garis kekuasaan dan tanggung jawab terletak pada masing-masing bagian yang ada dalam diDinas pendapatan daerah. Berikut ini adalah gambar struktur organisasi perusahaannya.



Gambar 2. Struktur Organisasi

E. Tugas dan Tanggung Jawab

Berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab perusahaan mebel UD.

Sudirman:

1. Kepala Dinas

Merencanakan, merumuskan dan mengembangkan, mengkoordinasi, mengendalikan tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantu di bidang pendapatan.

2. Bagian Tata Usaha

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- 1) Bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi bagi seluruh satuan kerja dilingkungan Dinas Pendapatan.
- 2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:
 - a) Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya.
 - b) Mengatur pelaksanaan kegiatan sebagian urusan ketatausahaan meliputi surat-menyurat, kearsipan, surat perjalanan dinas, mendistribusi surat sesuai bidang.
 - c) Melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas.
 - d) Melaksanakan usulan kenaikan pangkat, mutasi, dan pensiun.
 - e) Melaksanakan usulan gaji berkala, usul tugas belajar.
 - f) Menghimpun dan mensosialisasi peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian dalam lingkup dinas.
 - g) Menyiapkan bahan penyusunan standarisasi meliputi bidang kepegawaian, pelayanan, organisasi dan ketatalaksanaan.
 - h) Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
 - i) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
 - j) Menyusun laporan lain.

b. Sub bagian Keuangan dan Perlengkapan

- 1) Menyusun rencana, membagi tugas, member petunjuk dan menilai pelaksanaan tugas bawahan pada sub bagian keuangan dan

perlengkapan serta melaksanakan pelayanan administrasi urusan keuangan dan perlengkapan.

- 2) Sub Bagian Keuangan Dan Perlengkapan menyelenggarakan Fungsi:
 - a) Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya.
 - b) Mengumpulkan dan menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 - c) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan Penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) dan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DAKS) dari masing-masing satuan kerja sebagai bahan konsultasi Perencanaan ke Bapenda.
 - d) Menyusun realisasi perhitungan anggaran dan administrasi perbendaharaan dinas.
 - e) Menyusun rencana kebutuhan barang perlengkapan Dinas;
 - f) Membuat laporan inventaris barang dan tata administrasi perlengkapan.
 - g) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi dari masing-masing kerja;
 - h) Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
 - h) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
 - i) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

3. Bidang Pendataan

a. Seksi Pendaftaran dan Pendataan

- 1) Seksi pendaftaran dan pendataan mempunyai tugas menyusun rencana memberi petunjuk dan menilai pelaksanaan kegiatan staf serta

menyiapkan bahan pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak dan Wajib retribusi daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

- 2) Seksi Pendaftaran dan Pendataan menyelenggarakan fungsi.
 - a) Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya.
 - b) Menyiapkan penyusunan bahan pelaksanaan pendaftaran dan pendataan serta pemeriksaan Wajib Pajak dan Retribusi.
 - c) Mendistribusikan formulir dan melaksanakan kegiatan pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.
 - d) Menginventarisir formulir pendaftaran yang telah diisi oleh Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi;e. Membuat laporan tentang formulir pendaftaran yang belum dan sudah diterima.
 - e) Memberikan nomor pendaftaran, Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD).
 - f) Menghimpun dan mencatat data objek dan subjek pajak, retribusi daerah dan pendapatan-pendapatan lainnya.
 - g) Melakukan pendaftaran pendataan, pemereksaan lapangan objek dan subjek Pajak dan Retribusi Daerah dan pendapatan daerah lainnya.
 - h) Membuat buku induk pajak dan retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.
 - i) Mengirim kartu data kebidang penetapan sebagai bahan penerbitan surat ketetapan.

- j) Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
- k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- l) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

b. Seksi Dokumentasi dan Pusat Data Elektronik (PDE)

- 1) Menyiapkan bahan penyimpanan dan pemeliharaan data wajib pajak dan wajib retribusi daerah serta memelihara perangkat pengelolaan data.
- 2) Dokumentasi dan Pusat Data Elektronik menyelenggarakan fungsi:
 - a) Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya.
 - b) Menghimpun, mengelolah dan menyusun data pendaftaran dan pendataan wajib pajak dan wajib retribusi daerah baik secara manual maupun elektronik.
 - c) Menghimpun dan mencetak data wajib pajak dan wajib retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.
 - d) Memelihara Buku Induk Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah melalui perangkat data elektronik.
 - e) Membuat kartu dan memberikan kartu pengenal Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan Nomor Pokok Wajib Distribusi Daerah (NPWRD).
 - f) Melakukan penyimpanan arsip surat-surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan.
 - g) Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan Kartu Data Wajib Pajak dan Retribusi Daerah lainnya.

4. Bidang Penetapan

a. Seksi analisa dan perhitungan

- 1) Menyusun rencana, memberikan petunjuk dan penilaian pelaksanaan kegiatan staf serta melakukan analisis perhitungan penetapan pajak dan retribusi daerah serta sumber pendapatan lainnya.
- 2) Analisa dan perhitungan menyelenggarakan fungsi.
 - a) Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya.
 - b) Melakukan analisis terhadap data objek pajak untuk menghitung besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dan retribusi daerah serta sumber pendapatan lainnya.
 - c) Membuat nota perhitungan penetapan atas pajak dan retribusi daerah serta sumber pendapatan lainnya.
 - d) Meneliti dan menandatangani hasil perhitungan pajak dan retribusi daerah serta sumber pendapatan lainnya.
 - e) Melakukan pembinaan dan evaluasi prestasi kerja staf.
 - f) Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
 - g) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

b. Seksi Penerbitan SKPD/SKPR.

- 1) Menyusun rencana, memberi petunjuk dan menilai pelaksanaan kegiatan staf serta melaksanakan legalisasi penerbitan Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) serta sumber pendapatan lainnya.

- 2) Seksi Penertiban dan Surat Ketetapan menyelenggarakan fungsi;
 - a) Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya.
 - b) Memberikan surat ketetapan pajak dan retribusi daerah serta sumber pendapatan lainnya.
 - c) Mendistribusikan Surat Ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah.
 - d) Mengolah data dan membuat daftar himpunan pokok pajak dan retribusi daerah.
 - e) Melakukan legalisasi alat pembayaran/Benda Berharga (BB) Pajak dan Retribusi Daerah.
 - f) Melakukan pembinaan dan evaluasi kerja staf.
 - g) Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
 - h) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

5. Bidang Penagihan dan Pembukuan

a. Seksi Penagihan

- 1) Menyusun rencana, memberi petunjuk dan menilai pelaksana kegiatan serta melaksanakan pengendalian kegiatan penagihan, pembinaan dan penegakan hukum.
- 2) Seksi penagihan menyelenggarakan fungsi;
 - a) Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya.
 - b) Melakukan pemantauan terhadap wajib pajak dan retribusi daerah yang masa pajaknya telah jatu tempo.

- c) Memperingati Wajib Pajak dan Retribusi Daerah yang lalai melaksanakan kewajibannya.
- d) Melakukan Penegakan Hukum terhadap Wajib Pajak dan Retribusi Daerah yang melanggar peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah.
- e) Melakukan Pengendalian Penagihan terhadap Wajib Pajak dan Retribusi Daerah.
- f) Membuat Surat Panggilan, Surat Teguran dan Surat Tagihan Paksa terhadap Wajib Pajak dan Retribusi Daerah yang menunggak.
- g) Melayani permohonan keberatan banding dan angsuran.
- h) Melakukan Pembinaan dan Evaluasi terhadap hasil kerja staf.
- i) Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan unit tugasnya.
- j) Menyusun laporan hasil kerja pelaksanaan tugas.

b. Seksi pembukuan

- 1) Menyusun rencana memberi petunjuk dan menilai pelaksanaan kegiatan Staf serta Administrasi Pembukuan.
- 2) Seksi Pembukuan menyelenggarakan fungsi.
 - a) Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran Pelaksanaan Tugas.
 - b) Membukukan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)/Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), bagi hasil dan penerimaan daerah lainnya serta persediaan benda berharga dan membuat Laporan Tunggakan Asli Daerah dan tunggakan lainnya.

- c) Menerima dan mencatat Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan surat ketetapan lainnya yang telah dibayar lunas dan menghitung tunggakan serta membuat laporan berkala mengenai realisasi penerimaan.
- d) Membuat dan mengirim laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah secara berkala.
- e) Menyusun hasil pelaksanaan tugas.

6. Bidang Pengembangan, Peningkatan dan Pengendalian

a. Seksi Pengembangan, Peningkatan Pendapatan dan Pengendalian.

- 1) Menyusun rencana, memberi petunjuk dan penilaian pelaksanaan tugas staf dan rencana pendapatan daerah, pembinaan teknis administrasi, penyusunan program identifikasi dan ekstensifikasi serta hubungan tata kerja dan pemberian saran pungutan serta pengendalian operasional.
- 2) Seksi Pengembangan, Peningkatan Pendapatan dan pengendalian menyelenggarakan fungsi
 - a) Memberi petunjuk dan bimbingan, pengawasan kepada staf untuk kelancaran Membagi pelaksanaan tugas.
 - b) Maengumpulkan data potensi pendapatan dalam rangka menyusun rencana pendapatan.
 - c) Menyusun program identifikasi dan ekstensifikasi dalam mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka menyusun perubahan dan perhitungan APBD.
 - d) Menyusun rencana pengawasan dan pengendalian operasional.

e) Menyusun rencana teknis.

b. Seksi Evaluasi, Hukum dan Perundang-undangan.

- 1) Menyusun rencana memberi petunjuk dan menilai pelaksanaan tugas kegiatan staf yang menyusun konsep pengawasan dan rencana Peraturan Daerah dibidang pendapatan serta mengevaluasi pelaksanaan.
- 2) Seksi Evaluasi, Hukum dan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi
 - a) Membuat analisa laporan serta evaluasi pelaksanaan tugas.
 - b) Mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep/rencana Peraturan Daerah dibidang Pendapatan.
 - c) Mengkoordinasi dengan unit kerja terkait atas suatu peraturan Daerah dibidang pendapatan.
 - d) Mengkoordinasikan penyelesaian hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.
 - e) Memantau, mempelajari dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan daerah dan ketentuan lainnya.
 - f) Mengkoordinasikan kegiatan pembuatan dan pengiriman laporan realisasi penarikan baik yang dikelolah oleh Dipenda maupun Unit kerja lainnya.

7. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah)

a. Tugas Pokok

UPTD Pajak Bumi dan anggunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam menujung kemampuan

teknis, pelaksanaan teknis dan operasional dalam bidang pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 UPTD Pajak Bumi dan Bangunan meyelenggarakan fungsi:

- 1) Melaksanakan rencana kerja dibidang Pajak Bumi dan Bangunan sesuai rencana yang ditetapkan.
- 2) Melaksanakan kegiatan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan.
- 3) Melaksanakan kegiatan identifikasi dan intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan.
- 4) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, menyangkut kegiatan yang berkenaan dengan upaya meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan.
- 5) Melaksanakan penyuluhan, penagihan dan membantu melaksanakan pendataan serta memeriksa objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan.

F. Aktivitas Perusahaan

Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Penghasilan Daerah yang kemudian menjadi unit-unit yang menangani sumber-sumber keuangan daerah seperti Dinas Perpajakan, Dinas Pasar dan Sub Dinas Pelelangan Ikan dan semua Sub-sub Dinas dalam unit penghasilan daerah yang tergabung dalam unit penghasilan daerah dilebur dan dimasukkan pada unit kerja Dinas Pendapatan Daerah kab. Luwu

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Anggaran Pemerintah Kab. Luwu

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada hakekatnya merupakan instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, maka pemerintah daerah harus berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dengan demikian maka APBD merupakan alat/wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan program yang telah melalui perumusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang manfaatnya benar-benar akan dirasakan oleh masyarakat. Agar dapat menjadi efektif untuk menampung aspirasi dan keinginan masyarakat, maka sistem penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perumusan rancangan APBD harus sesuai dengan aturan dan prosedur yang sudah ditetapkan pemerintah dengan diikuti pengawasan dan pengendaliannya.

Pemerintahan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah. Atas dasar semangat itulah maka beban tugas dan tanggung jawab Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dirasakan semakin berat, karena aparatur daerah dituntut untuk mewujudkan administrasi Negara yang mampu

mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam rangka pemenuhan tuntutan tersebut, maka diperlukan pengembangan sistem serta prosedur kerja yang cepat, tepat, jelas dan nyata serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga penyelenggaraan tugas-tugas pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan harus bisa berlangsung secara baik.

B. Anggaran dan Realisasi Anggaran Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2014-2016

Nomor	Uraian	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016
1	Pendapatan			
1.1	Pendapatan Asli Daerah	20.398.764.209	21.418.839.483	17.343.783.489
1.2	Pendapatan Transfer	486.042.272.291	493.870.168.227	576.001.974.274
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	452.169.858.611	471.417.436.551	467.675.344.504
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	23.195.408.00	11.924.850.000	94.250.948.113
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	10.667.005.680	10.527.881.676	14.075.681.657
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	12.628.031.198	11.474.445.754	13.503.818.532
	Jumlah	519.069.067.698	526.763.453.464	606.849.576.296
2	Belanja Daerah			
2.1	Belanja Operasi	389.126.144.860	418.423.506.141	496.282.699.295
2.2	Belanja Modal	152.911.613.904	120.856.244.770	99.857.780.515
2.3	Belanja Tak Terduga	0	892.500	0
2.4	Transfer	0	488.486.790	499.083.354
	Jumlah Belanja + Transfer	542.037.758.764	539.769.130.201	596.639.563.164
	Surplus /(Defisit)	-22.968.691.065	-13.005.676.756	10.210.013.132
3	Pembiayaan Daerah			
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	75.904.519.341	45.889.810.371	31.711.615
3.2	Pengeluaran			

	Pembiayaan			
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	12.229.617.889	1.287.502.548	1.196.616.630
	Pembiayaan Netto	63.674.901.451	44.602.307.823	30.514.998.739
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Berkenaan (SiLPA)	40.706.210.386	31.596.631.086	40.725.011.871

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2014-2016

C. Perhitungan Rasio Keuangan Daerah pada Kabupaten Luwu

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan bersinambungan untuk menilai keberhasilan dan ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi instansi pemerintahan. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran.

Dalam mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu, ada beberapa rasio yang dapat digunakan. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan dalam pembahasan sebagai berikut:

1. Rasio Kemandirian Daerah

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber data ekstern.

a. Rasio Kemandirian Tahun Anggaran 2014

$$\begin{aligned}
 \text{Rasio Kemandirian} &= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer Dana + Pinjaman}} \\
 &= \frac{20.398.764.209,46}{486.042.272.291,00 + 0} \times 100\% \\
 &= 4,19 \%
 \end{aligned}$$

b. Rasio Kemandirian Tahun Anggaran 2015

$$\begin{aligned}
 \text{Rasio Kemandirian} &= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer Dana + Pinjaman}} \\
 &= \frac{21.418.839.483,39}{493.870.168.227,00 + 0} \times 100\% \\
 &= 4,33 \%
 \end{aligned}$$

c. Rasio Kemandirian Tahun Anggaran 2016

$$\begin{aligned}
 \text{Rasio Kemandirian} &= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer Dana + Pinjaman}} \\
 &= \frac{17.343.783.489,88}{576.001.974.274,35 + 0} \times 100\% \\
 &= 3,01 \%
 \end{aligned}$$

2. Rasio Efektifitas dan Efisiensi

Menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal

sebesar 1 (satu) atau 100%. Namun demikian semakin tinggi rasio efektifitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Rasio efektifitas Pemerintah Kabupaten Luwu dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD Yang Ditetapkan Berdasarkan Potensi Rill Daerah}}$$

Untuk memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektifitas perlu diperbandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai pemerintah. Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 atau dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisien menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Rasio efisiensi Pemerintah Kabupaten Luwu dihitung sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Yang Dikeluarkan Untuk Memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

Tabel 3. Target dan Realisasi Tahun Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Tahun Anggaran 2014-2016

Keterangan	2014	2015	2016
Target Penerimaan PAD	32.797.480.272,00	35.974.314.248,00	52.606.038.817,00
Realisasi Penerimaan PAD	20.398.764.209,46	21.418.839.483,39	17.343.783.489,88
Biaya Pemungutan PAD	435.297.722,00	580.887.744,00	375.522.395,00
Rasio Efektivitas	62,19 %	59 ,53%	32 ,96%
Rasio Efisiensi	2,13 %	2,71 %	2,16 %

Sumber: Data Diolah

$$\begin{aligned}
 \text{a) Rasio Efektifitas 2014} &= \frac{20.398.764.209,46}{32.797.480.272,00} \times 100\% \\
 &= 62,19 \%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Rasio Efektifitas 2015} &= \frac{21.418.839.483,39}{35.974.314.248,00} \times 100\% \\
 &= 59,53\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Rasio Efektifitas 2016} &= \frac{17.343.783.489,88}{52.606.038.817,00} \times 100\% \\
 &= 32,96\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) Rasio Efisiensi 2014} &= \frac{435.297.722,00}{20.398.764.209,46} \times 100\% \\ &= 2,13 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi 2015} &= \frac{580.887.744,00}{21.418.839.483,39} \times 100\% \\ &= 2,71\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi 2016} &= \frac{375.522.395,00}{17.343.783.489,88} \times 100\% \\ &= 2,16\% \end{aligned}$$

3. Rasio Aktivitas (Rasio Kekeragaman)

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Rasio ini dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Rutin Terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total APBD}}$$

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total APBD}}$$

Tabel 4. Perhitungan Rasio Aktivitas Pemerintah Kabupaten Luwu
Tahun Anggaran 2014-2016

Keterangan	2014	2015	2016
Belanja Operasi	389.126.144.860,40	418.423.506.141,00	496.282.699.295,00
Belanja Modal	152.911.613.904,00	120.856.244.770,00	99.857.780.515,00
Rasio Belanja Operasi	71,78%	77,51%	83,17 %
Rasio Belanja Modal	28,21 %	22,39 %	16,73 %

Sumber : Data diolah

1. Rasio Aktivitas tahun 2014 :

$$\begin{aligned} \text{a. Belanja Operasi} &= \frac{389.126.144.860,40}{542.037.871.764,40} \times 100\% \\ &= 71,78 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. Belanja Modal} &= \frac{152.911.726.904,00}{524.037.871.764,40} \times 100\% \\ &= 28,21\% \end{aligned}$$

2. Rasio Aktivitas 2015 :

$$\begin{aligned} \text{a. Belanja Operasi} &= \frac{418.423.506.141,00}{539.769.130.201,00} \times 100\% \\ &= 77,51\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. Belanja Modal} &= \frac{120.856.244.770,00}{539.769.130.201,00} \times 100\% \\ &= 22,39 \% \end{aligned}$$

3. Rasio Aktivitas 2016 :

$$\begin{aligned} \text{a. Belanja Operasi} &= \frac{496.282.699.295,00}{596.639.563.164,00} \times 100\% \\ &= 83,17\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. Belanja Modal} &= \frac{99.857.780.515,00}{596.639.563.164,00} \times 100\% \\ &= 16,73\% \end{aligned}$$

4. Debt Service Coverage Ratio

Selain menggunakan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah dapat menggunakan alternatif sumber dana lain, yaitu dengan melakukan pinjaman, sepanjang prosedur dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Debt Service Coverage Ratio (DSCR) Kabupaten Luwu dapat dihitung sebagai berikut :

$$\text{DSCR} = \frac{(\text{PAD} + \text{BD} + \text{DAU}) - \text{BW}}{\text{Total (pokok angsuran} + \text{bunga} + \text{biaya pinjaman)}}$$

Tabel 5. Perhitungan *Debt Service Coverage Ratio* Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2014-2016

No	Keterangan	2014	2015	2016
1.	Pendapatan Asli Daerah	20.398.764.209,46	21.418.839.483,39	17.343.783.489,88
2.	Bagi Hasil Pajak /bukan Pajak	32.639.594.611,00	30.838.375.551,00	33.530.599.504,00

3.	Dana Alokasi Umum	363.390.164.000,00	370.482.061.000,00	383.218.545.000,00
4.	Belanja Pegawai	389.126.144.860,40	310.185.151.325,00	365.059.030.340,00
5.	Belanja Anggota DPRD	2.349.600.000,00	1.253.085.000,00	2.313.080.000,00
6.	Bunga	536.747.560,40	-	-
7.	Pokok Angsusan	-	1.142.375.148,00	1.196.616.630,00
8.	DSCR	1,26%	9,74 %	5,57 %

Sumber: Data diolah

$$\begin{aligned}
 & (2.398.764.209,46 + 32.640.594.611,00 + 363.390.164.000,00) \\
 & - (389.126.144.860,40 + 2.349.600.000,00) \\
 1. \text{ DSCR 2014} &= \frac{\quad}{536.747.560,40} \\
 &= 1,29\% \\
 & (20.418.839.483,39 + 30.838.375.551,00 + 370.482.061.000,00) \\
 & - (310.185.151.325,00 + 1.253.085.000,00) \\
 2. \text{ DSCR 2015} &= \frac{\quad}{1.142.375.148,00} \\
 &= 9,74 \% \\
 & (17.343.783.489,88 + 33.530.599.504,00 + 383.218.545.000,00) \\
 & - (365.059.030.340,00 + 2.313.080.000,00) \\
 3. \text{ DSCR 2016} &= \frac{\quad}{1.196.616.630,00} \\
 &= 5,57 \%
 \end{aligned}$$

5. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*Growth Ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian.

Tabel 6. Perhitungan Rasio Pertumbuhan APBD Kabupaten Luwu Tahun
Anggaran 2014-2016

No.	Keterangan	2014	2015	2016
1.	Pendapatan Asli Daerah	20.398.764.209,46	21.418.839.483,39	17.343.783.489,88
2.	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah		5,00 %	-19,02 %
3.	Pendapatan	519.069.067.698,96	526.763.453.464,39	606.496.876.693,37
4..	Pertumbuhan Pendapatan		1,48 %	15,13 %
5.	Belanja Operasi	389.126.144.860,40	418.423.506.141,00	496.282.699.295,00
6.	Pertumbuhan Belanja Operasi		7,52 %	18,60 %
7.	Belanja Modal	152.911.613.904,00	120.856.244.770,00	99.857780.515,00

8.	Pertumbuhan Belanja Modal		-20,96 %	-17,37 %
----	---------------------------------	--	----------	----------

Sumber: Data diolah

1. Rasio Pertumbuhan 2014 -2015

$$\begin{aligned}
 \text{a. PAD} &= \frac{21.418.839.483,39 - 20.398.764.209,46}{20.398.764.209,46} \\
 &= 5,00 \% \\
 \\
 \text{b. Pendapatan} &= \frac{526.763.453.464,39 - 519.069.067.698,96}{519.069.067.698,96} \\
 &= 1,48 \% \\
 \\
 \text{c. Belanja Operasi} &= \frac{418.423.506.141,00 - 389.126.144.860,40}{389.126.144.860,40} \\
 &= 7,52 \% \\
 \\
 \text{d. Belanja Modal} &= \frac{120.856.244.770,00 - 152.911.613.904,00}{152.911.613.904,00} \\
 &= -20,96 \%
 \end{aligned}$$

2. Rasio Pertumbuhan 2015 – 2016

$$\begin{aligned}
 \text{a. PAD} &= \frac{17.343.783.489,88 - 21.418.839.483,39}{21.418.839.483,39} \\
 &= -19,02\% \\
 \\
 \text{b. Pendapatan} &= \frac{606.496.876.693,37 - 526.763.453.464,39}{526.763.453.464,39}
 \end{aligned}$$

$$= 15,13 \%$$

$$\text{c. Belanja Operasi} = \frac{496.282.699.295,00 - 418.423.506.141,00}{418.423.506.141,00}$$

$$= 18,60 \%$$

$$\text{d. Belanja Modal} = \frac{99.857.780.515,00 - 120.856.244.770,00}{120.856.244.770,00}$$

$$= -17,37 \%$$

D. Hasil Evaluasi Kinerja Keuangan Dearah Kabupaten Luwu

1. Rasio Kemandirian Daerah

Tabel 7. Rasio Keuangan Daerah Kabupaten Luwu
Tahun Anggaran 2014-2016

Uraian	2014	2015	2016	Keterangan
Rasio Kemandirian Daerah	4,19%	4,33%	3,01%	Kemandirian daerah dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat masih sangat rendah

Sumber: Data diolah

Dari tabel diatas diketahui bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Luwu pada tahun anggaran 2014 sebesar 4,19%, naik pada tahun 2015 sebesar 4,33% dan pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 3,01%

Hal ini menunjukkan bahwa kemandirian daerah dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat masih sangat rendah. Terlihat dari Pendapatan Asli Daerah yang mengalami naik turun dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, perlu adanya usaha untuk mengurangi ketergantungan terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintahan pusat dan provinsi), baik melalui pengoptimalan sumber pendapatan asli daerah khususnya pada pendapatan lain-lain PAD yang sah yang mengalami penurunan di tahun anggaran 2014-2016

2. Rasio Efektifitas dan Efisiensi

Tabel 8. Rasio Efektifitas dan Efisiensi Kabupaten Luwu
Tahun Anggaran 2014-2016

No.	Uraian	2014	2015	2016	Keterangan
1.	Rasio Efektifitas	62,19 %	59 ,53%	32 ,96%	Pemerintah daerah tidak efektif dalam merealisasikan pendapatan daerah pada tahun 2014-2016
2	Rasio Efisiensi	2,13 %	2,71 %	2,16 %	Pemerintah daerah sangat efisien dalam memungut sumber pendapatan daerah. Semakin kecil rasio efisiensinya menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas dan efisiensi dapat dilihat bahwa rasio efektifitas Pemerintah Kabupaten Luwu dalam melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah yang merupakan sumber pendapatan asli daerah pada tahun 2014 adalah 62,19 %, 2015 59,53 % dan 2016 32,96 % . Angka ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak efektif dalam merealisasikan sumber pendapatan asli daerah khususnya dalam melakukan pemungutan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Sedangkan dari perhitungan rasio efisiensi diatas kinerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu dapat dikatakan sangat efisien karena dari perhitungan rasio dari tahun 2014 2,13%, 2015 2,71%, dan 2016 2,16% mengalami kenaikan pada tahun pada tahun 2015 yang berarti adanya penurunan kinerja pada pemerintah, lalu pada tahun 2016 rasio efisiensinya mengalami penurunan yang menggambarkan meningkatnya kinerja pemerintah. Ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mengalami peningkatan kinerja dari segi efisiensinya melakukan pemungutan sumber pendapatan.

3. Rasio Aktivitas (Rasio Keseimbangan)

Tabel 9. Rasio Aktivitas Kabupaten Luwu
Tahun Anggaran 2014-2016

Uraian	2014	2015	2016	Keterangan
Rasio Belanja Operasi	77,15 %	71,78 %	83,17 %	Sebagian besar dana APBD diiprioritaskan untuk kebutuhan operasional sehingga belanjaoperasional mengalami peningkatan dari tahun 2014 hingga 2016
Rasio Belanja Modal	28,21 %	22,39 %	16,73 %	Hanya sebagian kecil dana APBD digunakan untuk pembangunan dan itupun rasionya mengalami penurunan dari tahun ke tahun

Sumber : Data diolah

Dari tabel 5.7 diatas terlihat sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal terhadap APBD masih relatif kecil.

Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya rasio belanja operasi maupun belanja modal terhadap APBD yang ideal karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun demikian, sebagai negara berkembang peranan pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar. Namun hal ini masih kurang diperhatikan oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten Luwu karena terlihat rasio belanja modal dari tahun ke tahun menurun.

4. *Debt Service Coverage Ratio*

Tabel 10. *Debt Service Coverage Ratio* Kabupaten Luwu
Tahun Anggaran 2014-2016

Uraian	2014	2015	2016	Keterangan
<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	1,29%	9,74%	5,57%	Tahun 2015-2016 pemerintah daerah memiliki peluang untuk melakukan pinjaman apabila diperlukan karena terlihat bahwa DSCR Pemerintah Kabupaten Luwu berada diatas standar persyaratan (DSCR > 2,5%) untuk dapat melakukan pinjaman. Sedangkan tahun 2014 pemerintah daerah tidak dapat melakukan pinjaman karena DSCRnya dibawah standar yang ditentukan.

Sumber : Data diolah

DSCR mengindikasikan kelayakan pemerintah daerah untuk melakukan pinjaman. DSCR ditetapkan minimal 2,5 (Pasal 12, PP No 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah) dan sebaliknya jika DSCR dibawah 2,5 maka tidak diperbolehkan lagi melakukan pinjaman.

Dari tabel 5.8 diatas terlihat bahwa DSCR Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu pada tahun 2014 tidak dapat melakukan pinjaman karena DSCRnya berada dibawah standar. Sedangkan tahun 2015 dan 2016 berada diatas standar (DSCR >2,5). Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah layak melakukan pinjaman, baik jangka menengah maupun jangka panjang apabila terjadi kekurangan dana atau defisit anggaran.

5. Rasio Pertumbuhan

Tabel 11. Rasio Pertumbuhan Kabupaten Luwu
Tahun Anggaran 2014-2016

Uraian	2014	2015	2016	Keterangan
PAD	-	5,00 %	-19,02 %	Kinerja pemerintahan daerah menunjukkan pertumbuhan yang positif selama tahun 2014-2015 hanya pada belanja modal yang pertumbuhannya negatif. Dan tahun 2015-2016 hanya pertumbuhan pendapatan dan belanja operasi yg mengalami pertumbuhan yang negatif.
Pendapatan	-	1,48 %	15,13 %	
Belanja Operasi	-	7,52 %	18,60 %	
Belanja Modal	-	-20,96 %	-17,37 %	

Sumber : Data diolah

Dari perhitungan rasio pada tabel 5.9 diatas dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan APBD Kabupaten Luwu pada Tahun Anggaran 2014-2015 pertumbuhan pendapatan asli daerah, pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan belanja operasi menunjukkan pertumbuhan yang positif, hanya belanja modal yang menunjukkan pertumbuhan negatif. Sedangkan pada tahun 2015-2016 pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan belanja operasi mengalami pertumbuhan yang positif. Sebaliknya dengan pertumbuhan pendapatan asli daerah dan pertumbuhan belanja modal mengalami pertumbuhan yang negatif.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu dalam merealisasikan pendapatan asli daerahnya tergolong tidak efektif dan tergolong efisien, yakni efektivitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu pada periode 2014 – 2016 cenderung menurun dari tahun ke tahun dan efisiensi kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu pada periode 2014 – 2016 mengalami naik turun dari tahun ke tahun.

Sebagian besar yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu masih diprioritaskan untuk mencukupi kebutuhan belanja operasi daripada belanja modal. Namun pelaksanaan pembangunan masih kurang diperhatikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu terlihat dari rasio belanja modal dari tahun ke tahun menurun.

Pertumbuhan APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu tahun anggaran 2014-2016 menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan asli daerah dan pertumbuhan belanja modal menunjukkan pertumbuhan yang negatif. Sedangkan pada pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan belanja operasi mengalami pertumbuhan yang positif.

Kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Luwu selama periode penelitian (tahun 2014 sampai tahun 2016) kurang baik karena hampir semua perhitungan rasio mengalami penurunan kinerja.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan tersebut, maka hal-hal yang dapat disarankan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu dapat menggunakan analisis rasio keuangan untuk melakukan penilaian dan evaluasi kinerja untuk kepentingan manajemen birokrasi pemerintah serta untuk menambah kualitas sistem informasi keuangan daerah.
2. Lebih mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang ada maupun yang belum diolah agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga ketergantungan terhadap sumber daya ekstern dapat diminimalisir
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu sebaiknya memprioritaskan lagi pengalokasian dana yang dimiliki untuk belanja modal sehingga semakin bertambahnya sarana dan prasarana yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu diharapkan dapat meningkatkan kemampuan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan, baik itu dengan memberikan bimbingan teknis dan pelatihan mengenai pengelolaan keuangan daerah. Dengan begitu diharapkan penyusunan laporan keuangan dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu sehingga memudahkan penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah untuk tahun anggaran berikutnya serta dapat menjadi informasi yang relevan bagi pemakainnya

DAFTAR PUSTAKA

- Blocher. 2013. *Manajemen Biaya Penekanan Strategis, Edisi kelima*. Jakarta: Salemba Empat.
- Carter, William K. 2009. *Akuntansi Biaya Edisi keempat belas*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dunia, Firdaus Ahmad dan Wasilah. 2009. *Akuntansi Biaya, edisi kedua*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hansen, Mowen. 2010. *Management Accounting, edisi ketujuh*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta : Erlangga.
- Manullang. 2005. *Pengantar Manajemen Keuangan, edisi pertama cetakan kelima*. Yogyakarta: Andi.
- Maria. 2011. *Analisis Penerapan Variabel Costing Sebagai Alat Pengambilan Keputusan Produksi pada PT. Semen Gresik*. Fakultas Ekonomi Universitas Ubaya, Surabaya.
- Mulyadi. 2005. *Akuntansi biaya edisi pertama, cetakan ketujuh*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Mulyadi. 2014. *Akuntansi Biaya Edisi Kelima*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Muqodim. 2005. *Teori Akuntansi, edisi pertama, cetakan pertama*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Mursyidi. 2008. *Akuntansi Biaya , cetakan pertama*. Bandung : Refika Aditama.
- Musdalifah. 2014. *Penerapan Metode Variabel Costing Dalam Penentuan Harga Jual Pada PT. Cahaya Murni Raya Industri*. Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Prawironegoro, Darsono, dan Ari Purwanti. 2009. *Akuntansi Manajemen*, Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Purwanti, Ari dan Darsono. 2013. *Akuntansi Manajemen ,Edisi ketiga Revisi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

- Rahmawati. 2012. *Akuntansi Biaya 1 DC, cetakan pertama*. Jakarta : Pustaka Refleksi.
- Samryn, L,M. 2012. *Akuntansi Manajemen*, Edisi pertama. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup.
- Siswanto dan Muhadi. 2005. *Akuntansi biaya, Cetakan Kelima*. Jakarta : Ekonisia.
- Sugiri. 2009. *Akuntansi Manajemen*, edisi keempat. *Cetakan ketiga*. Yogyakarta: : UPP STIM YKPN.
- Sunarto. 2009. *Akuntansi Biaya*. Yogyakarta: AMUS Yogyakarta.
- Witjaksono. 2013. *Akuntansi Biaya, edisi revisi, cetakan pertama*. Jakarta : Graha Ilmu.
- Witjaksono, Armanto. 2006. *Akuntansi Biaya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN KABUPATEN LUWU TAHUN
ANGGARAN 2014-2016**

Nomor	Uraian	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016
1	Pendapatan			
1.1	Pendapatan Asli Daerah	20.398.764.209	21.418.839.483	17.343.783.489
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	3.899.805.010	3.730.536.863	3.528.263.511
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	8.149.220.402	9.148.255.176	8.166.122.770
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	335.337.028	610.098.232	557.423.188
1.1.4	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	8.014.401.768	7.929.949.210	5.091.974.020
1.2	Pendapatan Transfer	486.042.272.291	493.870.168.227	576.001.974.274
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	452.169.858.611	471.417.436.551	467.675.344.504
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	30.157.094.625	29.981.229.697	31.683.133.078
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	2.483.499.986	857.145.854	1.847.466.426
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	363.390.164.000	370.482.061.000	383.218.545.000
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	56.139.100.000	70.097.000.000	50.926.200.000
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	23.195.408.00	11.924.850.000	94.250.948.113
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	0	0	0
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	23.195.408.000	11.924.850.000	94.250.948.113
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	10.667.005.680	10.527.881.676	14.075.681.657
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	10.677.005.680	10.527.881.676	14.075.681.657
1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0	0	0
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	12.628.031.198	11.474.445.754	13.503.818.532
1.3.1	Pendapatan Hibah	0	0	0
1.3.2	Pendapatan Dana darurat	0	0	0
1.3.3	Pendapatan Lainnya	12.628.031.198	11.474.445.754	13.503.818.532
	Jumlah	519.069.067.698	526.763.453.464	606.849.576.296
2	Belanja Daerah			
2.1	Belanja Operasi	389.126.144.860	418.423.506.141	496.282.699.295

2.1.1	Belanja Pegawai	276.692.936.140	310.185.151.325	365.059.030.340
2.1.2	Belanja Barang	80.150.328.501	85.734.232.572	90.087.552.429
2.1.3	Belanja Bunga	536.747.560	0	0
2.1.4	Belanja Subsidi	0	0	0
2.1.5	Belanja Hibah	1.900.000.000	4.750.000.000	23.897.776.116
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	12.137.015.799	3.738.020.813	1.034.970.197
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	17.709.062.860	14.016.101.431	16.203.370.213
2.2	Belanja Modal	152.911.613.904	120.856.244.770	99.857.780.515
2.2.1	Belanja Tanah	674.630.000	946.677.199	116.320.000
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	28.152.378.152	12.416.562.018	9.905.831.435
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	32.951.010.548	50.521.674.991	17.407.569.794
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	86.164.440.104	56.836.040.062	72.346.398.436
2.2.5	Belanja Aset tetap Lainnya	4.534.155.100	135.290.500	81.660.850
2.2.6	Balanja Aset Lainnya	0	0	0
2.3	Belanja Tak Terduga	0	892.500	0
2.3.1	BelanjaTak Terduga	0	892.500	0
2.4	Transfer	0	488.486.790	499.083.354
2.4.1	Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	0	488.486.790	499.083.354
2.4.2	Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	0	0	0
2.4.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	0	0	0
	Jumlah Belanja + Transfer	542.037.758.764	539.769.130.201	596.639.563.164
	Surplus /(Defisit)	-22.968.691.065	-13.005.676.756	10.210.013.132
3	Pembiayaan Daerah			
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	74.517.185.182	40.706.210.386	31.596.631.086
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0	0	0
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0

3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	115.819.001	2.090.229.478	100.616.173
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	155.420.010	42.083.291	14.368.110
3.1.7	Penerimaan Hutang Belanja	1.116.095.148	3.051.287.215	0
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	75.904.519.341	45.889.810.371	31.711.615
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	808.211.189	0	0
3.2.3	Investasi Dana Bergulir	0	0	0
3.2.4	Pembayaran Pokok Utang	11.421.406.700	1.142.375.148	1.196.616.630
3.2.5	Pemberian Pinjaman Daerah	0	145.127.400	0
3.2.6	Pembayaran Utang Belanja	0	0	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	12.229.617.889	1.287.502.548	1.196.616.630
	Pembiayaan Netto	63.674.901.451	44.602.307.823	30.514.998.739
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Berkenaan (SiLPA)	40.706.210.386	31.596.631.086	40.725.011.871

**BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK KABUPATEN LUWU
TAHUN ANGGARAN 2014-2016**

No	Uraian	2014	2015	2016
1	Biaya Pemungutan PBB	340.508.757	409.709.616	365.522.395
2	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	102.544.763	171.178.128	0
	Jumlah	435.297.722	580.887.744	375.522.395

PERHITUNGAN RASIO EFISIENSI PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Yang Dikeluarkan Untuk Memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi 2014} &= \frac{435.297.722,00}{20.398.764.209,46} \times 100\% \\ &= 2,13 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi 2015} &= \frac{580.887.744,00}{21.418.839.483,39} \times 100\% \\ &= 2,71\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi 2016} &= \frac{375.522.395,00}{17.343.783.489,88} \times 100\% \\ &= 2,16\% \end{aligned}$$

PERHITUNGAN RASIO EFISIENSI PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD Yang Ditetapkan Berdasarkan Potensi Rill Daerah}}$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektifitas 2014} &= \frac{20.398.764.209,46}{32.797.480.272,00} \times 100\% \\ &= 62,19\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektifitas 2015} &= \frac{21.418.839.483,39}{35.974.314.248,00} \times 100\% \\ &= 59,53\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektifitas 2016} &= \frac{17.343.783.489,88}{52.606.038.817,00} \times 100\% \\ &= 32,96\% \end{aligned}$$

PERHITUNGAN RASIO AKTIVITAS PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

$$\text{Rasio Belanja Rutin Terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total APBD}}$$

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total APBD}}$$

1. Rasio Aktivitas tahun 2014 :

$$\begin{aligned} \text{a. Belanja Operasi} &= \frac{389.126.144.860,40}{542.037.871.764,40} \times 100\% \\ &= 71,78 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. Belanja Modal} &= \frac{152.911.726.904,00}{524.037.871.764,40} \times 100\% \\ &= 28,21\% \end{aligned}$$

2. Rasio Aktivitas 2015 :

$$\begin{aligned} \text{a. Belanja Operasi} &= \frac{418.423.506.141,00}{539.769.130.201,00} \times 100\% \\ &= 77,51\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. Belanja Modal} &= \frac{120.856.244.770,00}{539.769.130.201,00} \times 100\% \\ &= 22,39 \% \end{aligned}$$

3. Rasio Aktivitas 2016 :

$$\begin{aligned} \text{a. Belanja Operasi} &= \frac{496.282.699.295,00}{596.639.563.164,00} \times 100\% \\ &= 83,17 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. Belanja Modal} &= \frac{99.857.780.515,00}{596.639.563.164,00} \times 100\% \\ &= 16,73 \% \end{aligned}$$

**PERHITUNGAN RASIO PERTUMBUHAN APBD PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU**

1. Rasio Pertumbuhan 2014 -2015

$$\begin{aligned} \text{a. PAD} &= \frac{21.418.839.483,39 - 20.398.764.209,46}{20.398.764.209,46} \\ &= 5,00 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. Pendapatan} &= \frac{526.763.453.464,39 - 519.069.067.698,96}{519.069.067.698,96} \\ &= 1,48 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c. Belanja Operasi} &= \frac{418.423.506.141,00 - 389.126.144.860,40}{389.126.144.860,40} \\ &= 7,52 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{d. Belanja Modal} &= \frac{120.856.244.770,00 - 152.911.613.904,00}{152.911.613.904,00} \\ &= -20,96 \% \end{aligned}$$

2. Rasio Pertumbuhan 2015 – 2016

$$\begin{aligned} \text{a. PAD} &= \frac{17.343.783.489,88 - 21.418.839.483,39}{21.418.839.483,39} \\ &= -19,02\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. Pendapatan} &= \frac{606.496.876.693,37 - 526.763.453.464,39}{526.763.453.464,39} \\ &= 15,13 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c. Belanja Operasi} &= \frac{496.282.699.295,00 - 418.423.506.141,00}{418.423.506.141,00} \\ &= 18,60 \% \\ \text{d. Belanja Modal} &= \frac{99.857.780.515,00 - 120.856.244.770,00}{120.856.244.770,00} \\ &= -17,37 \% \end{aligned}$$

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Samsiar panggilan Siar, lahir di Bajoe' pada tanggal 07 Agustus 1994, dari pasangan suami istri Bapak Syamsul dan Ibu Marwana. Penulis anak pertama dari lima bersaudara, penulis bertempat tinggal di Jln. Ratu Langi Lorong 1.

Pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis yaitu SDN 433 Bajoe lulus tahun 2007, SMPN 1 Belopa lulus tahun 2010, SMKN 1 Belopa lulus tahun 2013, dan mulai tahun 2013 mengikuti program S1 Akuntansi di kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa program S1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.